

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN2025**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

No	Catatan Hasil Reviu dan Rekomendasi	Tindak lanjut	Verifikasi	Ket
a.	Belum selaras antara sasaran dan indikator antara LKjIP dan Perjanjian Kinerja.			
1)	Bab I Pendahuluan a) Telah terdapat uraian tentang latar belakang. b) Telah terdapat uraian tentang struktur organisasi. c) Telah terdapat uraian tentang tugas dan fungsi perangkat daerah. d) Belum ada sub aspek organisasi yang menjelaskan terkait tantangan dan peluang, faktor kunci keberhasilan, analisis lingkungan strategis, risiko strategis, arah kebijakan dan strategis organisasi, keterkaitan dengan pencapaian kinerja. e) Belum ada uraian tentang permasalahan utama.	Telah di revisi hal 17 – 21 Telah di revisi hal 22 – 23		
2)	Bab II Perencanaan Kinerja a) Telah terdapat uraian tentang rencana sasaran strategis yang menggambarkan tercapainya tujuan dan telah dituangkan dalam pemetaan sasaran strategis tahun 2025-2029 dengan menampilkan tujuan, sasaran, indikator sasaran. b) Telah terdapat uraian tentang perjanjian kinerja tetapi belum menjelaskan definisi dan sumber data serta formulasi setiap indikator kinerja.			

3)	Bab III Akuntabilitas Kinerja a) Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan revidi atas BAB III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025, diketahui bahwa penyajian pada BAB III belum sepenuhnya mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut: - o Belum ada uraian definisi setiap indikator kinerja. • Telah terdapat uraian tentang analisis dan perbandingan target realisasi kinerja tahun 2025. • Belum ada uraian tentang analisis perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025, serta capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir. • Belum ada uraian tentang analisis realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun terakhir periode renstra. • Telah terdapat uraian tentang analisis dan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional. • Telah terdapat uraian penyebab keberhasilan/ kegagalan dan upaya yang telah dilakukan. • Telah terdapat uraian solusi yang telah dilakukan. • Telah terdapat uraian tentang analisis program/ kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. b) Realisasi Anggaran Telah terdapat uraian tentang analisis dan tabel realisasi anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.	Telah direvisi hal 37 Telah direvisi hal 43 Telah direvisi hal 43		
----	---	--	--	--

	4)	Bab IV a) Telah terdapat uraian kesimpulan umum namun belum menggambarkan secara umum mengenai capaian kinerja organisasi. b) Belum memuat uraian tentang langkah strategis pada bagian kesimpulan.	Telah direvisi hal 93		
--	----	--	-----------------------	--	--

Palembang, 11 Mei 2026

Yang memeriksa,



.....(Ha Restia).....







PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

**Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah**

**LKjIP
2025**

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Selain itu, laporan ini juga disusun sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat informasi mengenai capaian kinerja, evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta analisis terhadap keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas selama Tahun Anggaran 2025. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja organisasi serta menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Sehingga diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan realisasi investasi dan Pelayanan publik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Sumatera Selatan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan kinerja di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Palembang, 11 Maret 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,



H. Lusapta Yudha Kurnia, S.E., M.M
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197909012006041008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	I-6
1.5 Isu Strategis yang Dihadapi.....	I-14
1.6 Sistematika Penyusunan LKjIP.....	I-17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis Perangkat Daerah	II-20
2.2 Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2025	II-26
2.3 Langkah Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.....	II-29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	III-31
3.2 Realisasi Anggaran	III-57
BAB IV PENUTUP.....	IV-80
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah PNS DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan jenis kelamin, jabatan dan tingkat pendidikan tahun 2025.....	I-11
Tabel 1.2	Jumlah PPPK DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin, Jabatan dan Tingkat Pendidikan, Tahun 2025.....	I-12
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai PNS dan PPPK DPMPTSP Provinsi Sumsel Tahun 2025.....	I-13
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Sebelum Perubahan (RPD 2024-2026).....	II-22
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Setelah Perubahan (Renstra 2025-2029).....	II-23
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.....	II-24
Tabel 2.4	Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sebelum Perubahan (RPD 2024-2026).....	II-27
Tabel 2.5	Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Setelah Perubahan (Renstra 2025-2029).....	II-27
Tabel 2.6	Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.....	II-28
Tabel 3.1	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Sebelum Perubahan (RPD 2024-2026).....	III-32
Tabel 3.2	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Sebelum Perubahan (Renstra 2025-2029).....	III-33
Tabel 3.3	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025 Setelah Perubahan (Renstra 2025-2029).....	III-33
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja Sasaran Utama 1 Tahun 2025.....	III-34
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 1 dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025.....	III-36
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dari Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah.....	III-36
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dari Tahun 2025 Dengan Standar Nasional.....	III-37
Tabel 3.8	Rekapitulasi Jumlah LKPM Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2025.....	III-38
Tabel 3.9	Rekapitulasi Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Tahun 2025.....	III-39

Tabel 3.10	Pengukuran Kinerja Sasaran 2 Tahun 2025.....	III-48
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2021-2025.....	III-49
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dari Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (2029).....	III-49
Tabel 3.13	Daftar Nilai Interval IKM.....	III-50
Tabel 3.14	Realisasi Capaian Kinerja Utama Tahun 2025 sesuai PK Perubahan Tahun 2025.....	III-53
Tabel 3.15	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	III-55
Tabel 3.16	Rincian Belanja Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumsel Tahun 2025.....	III-57
Tabel 3.17	Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....	III-59
Tabel 3.18	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP Provinsi Sumsel Tahun 2024.....	III-72
Tabel 3.19	Rekomendasi, Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2025 dan Rencana Aksi Tahun 2026.....	III-76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Susunan Organisasi DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan.....	I-6
Gambar 1.2	Kantor DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan.....	I-8
Gambar 2.1	OKI Pulp & Paper.....	II-25
Gambar 3.1	Grafik Perbandingan Nilai Realisasi Investasi Tahun 2024-2025.....	III-35
Gambar 3.2	Identifikasi Penyelesaian Permasalahan ke PT. Prasadha Aneka Limbah Indonesia di Kab. Penukal Abab Lematang Ilir.....	III-39
Gambar 3.3	Grafik Target dan Realisasi Investasi PMA Tahun 2021-2025.....	III-40
Gambar 3.4	Grafik Target dan Realisasi Investasi PMDN Tahun 2021-2025.....	III-41
Gambar 3.5	Kegiatan Pembinaan Perusahaan PMA/PMDN.....	III-43
Gambar 3.6	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ke PT. Muba Global Lestari di Kabupaten Musi Banyuasin	III-43
Gambar 3.7	Grafik Jumlah Investor pada Tahun 2021-2025.....	III-44
Gambar 3.8	Bussiness Matching antara <i>Crude Coconut Oil</i> (CCO) dan Pemerintah Provinsi Sumsel.....	III-45
Gambar 3.9	Grafik Pertumbuhan Nilai Investasi Tahun 2021-2025.....	III-46
Gambar 3.10	Pembahasan Kerjasama Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik bersama PT. Vgreen Global Charging Station Investment Indonesia dengan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.....	III-47
Gambar 3.11	Sertifikat Juara 3 Nasional Penilaian Kinerja PTSP PBB Hasil Monitoring dan Evaluasi.....	III-69
Gambar 3.12	Sertifikat Juara 1 Stan Terbaik dalam acara Pameran 13 Tahun 2025 Bandung Indonesia Tourism Trade Investment Expo.....	III-70
Gambar 3.13	Juara Stand terbaik di bidang informasi pada ajang yang sama di Kota Batam.....	III-70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan LKjIP dilaksanakan sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKjIP juga mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 778/KPTS/VII/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan laporan Kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 872/KPTS/BAPPEDA/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam penetapan indikator kinerja utama.

Peraturan-peraturan tersebut memberikan pedoman kepada seluruh instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran. LKjIP memuat berbagai aktivitas, metode, serta prosedur yang digunakan dalam pencapaian target kinerja yang diukur berdasarkan realisasi data kinerja yang dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dirangkum sesuai dengan sasaran strategis organisasi untuk kemudian dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat mengenai capaian kinerja yang telah dicapai, yang seharusnya dicapai, serta yang belum tercapai.

Informasi tersebut menjadi dasar dalam melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Salah satu prinsip utama dalam penerapan manajemen kinerja adalah melakukan pengukuran kinerja guna menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai secara berkala setiap tahun. Hasil pengukuran dan perbandingan tersebut menggambarkan posisi kinerja organisasi dalam pencapaian sasaran strategis. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan perjanjian kinerja yang mengacu pada sasaran strategis yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perjanjian kinerja tersebut juga harus didukung oleh rencana aksi yang menguraikan secara rinci berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan serta alokasi anggaran yang digunakan.

Untuk memastikan bahwa rencana aksi dan target kinerja dapat tercapai secara optimal, diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara konsisten terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi tersebut bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program serta memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 dan mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan. Dinas ini mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPMPTSP berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD 2024-2026), serta Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2025–2029. Dokumen-dokumen perencanaan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan investasi serta pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Rencana Strategis DPMPTSP memberikan arah kebijakan yang jelas sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dalam upaya pencapaian target jangka pendek maupun jangka menengah yang berorientasi pada hasil (outcome). Capaian kinerja program dan kegiatan tersebut kemudian dituangkan dalam LKjIP sehingga dapat diketahui tingkat pencapaian target dan realisasi kinerja pada tahun berjalan.

Laporan kinerja ini memuat rencana, target, capaian, serta realisasi pengelolaan keuangan perangkat daerah sehingga dapat dilakukan pengukuran dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan serta laporan kinerja kepada pemerintah daerah pada setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan adalah sbb :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842).
6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang peraturan tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mengatur metode, mekanisme, dan desain evaluasi untuk menilai implementasi sistem akuntabilitas.
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 11);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025 yaitu :

Maksud

Maksud penyusunan LKjIP 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama 1 Tahun anggaran, sebagai dokumen evaluasi perencanaan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan tolak ukur kinerja DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan;
2. Memberikan informasi kinerja kepada kepala dinas, pengawas dan masyarakat;
3. Mendukung penerapan SAKIP yang transparan dan akuntabel.

Tujuan

Tujuan penyusunan LKjIP 2025 antara lain sebagai berikut :

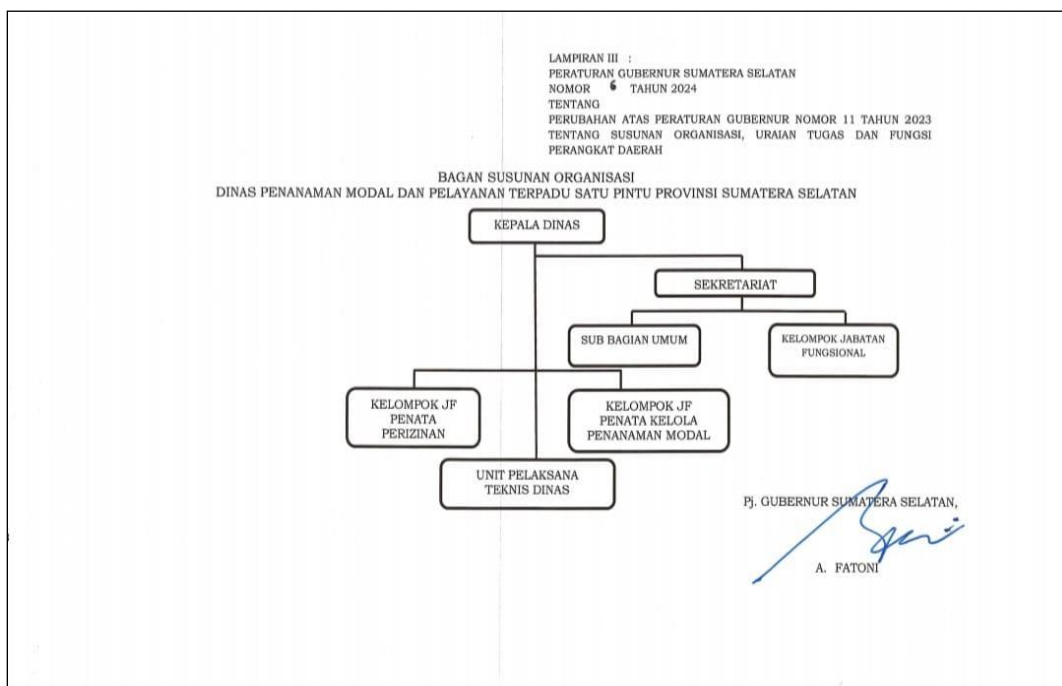
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Gubernur sebagai pemberi mandate atas capaian kinerja berdasarkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pembangunan bidang penanaman modal dan perizinan/ non perizinan di Provinsi Sumatera Selatan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi selama 1 Tahun;
2. Untuk mengukur capaian kinerja berdasarkan Perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
3. Sebagai bahan evaluasi dan upaya perbaikan kinerja ditahun berikutnya untuk meningkatkan kinerja;
4. Dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas public.
5. Mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan Organisasi DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 adalah :

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat, terdiri dari:
 - ❖ Subbagian Umum dan;
 - ❖ Kelompok Jabatan Fungsional;
- c) Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;
- d) Kelompok Jabatan Fungsional Penata Perizinan; dan
- e) UPTD.

Ketentuan Bagan Susunan Organisasi DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran III adalah sebagai berikut.



Sumber : Lampiran III Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024

Gambar 1.1
Bagan Susunan Organisasi DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

❖ **Kepala Dinas**

Kepala DPMPTSP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang diserahkan kepada provinsi. Untuk melaksanakan tugas pokoknya. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

- Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan PTSP;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan PTSP;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan PTSP;
- Pelaksanaan penyusunan perencanaan bidang penanaman modal dan PTSP;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dan PTSP;
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan PTSP;
- Pelaksanaan dan pengembangan sub urusan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
- Penyelenggaraan PTSP sesuai kewenangan Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

❖ **Sekretariat**



Sumber: Laporan Kinerja Sekretariat DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 1.2
Kantor DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, pembinaan, dan pengelolaan pelayanan administrasi umum, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, keuangan dan aset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integritas di lingkungan dinas;
- Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga;
- Pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dinas;
- Penyusunan rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
- Penyusunan rencana program kerja dan penganggaran;
- Pelaksanaan analisa, pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan program kerja dan anggaran;

- Penyusunan pelaporan pelaksanaan program kerja dan anggaran;
- Penyiapan bahan yang berhubungan dengan administrasi keuangan;
- Penyusunan rencana anggaran kas dan pengelolaannya;
- Pelaksanaan verifikasi dan perbendaharaan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan;
- Penyiapan data yang berkaitan dengan keuangan;
- Pelaksanaan fungsi koordinasi seluruh unsur di lingkungan dinas dalam pengelolaan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja dinas;
- Pemberian arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staff;
- Pelaksanaan koordinasi pengelolaan tugas-tugas bidang;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada pengelolaan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat terdiri atas:

a) Subbagian Umum, mempunyai fungsi :

- Menyusun rencana kegiatan umum;
- Melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
- Melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor;
- Melaksanakan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milih negara/daerah;
- Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- Melaksanakan urusan umum, hukum, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan;
- Menyiapkan bahan administrasi umum, kepegawaian, informasi dan dokumentasi;
- Menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- Menyiapkan data yang berkaitan dengan umum, humas dan kepegawaian;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas:

Jabatan fungsional perencanaan, jabatan fungsional keuangan dan jabatan fungsional kepegawaian.

❖ **Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal**

❖ **Kelompok Jabatan Fungsional Penata Perizinan**

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/ atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/ atau keterampilan.
- Penugasan secara individu dan/ atau dalam tim kerja dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/ atau lintas Instansi.
- Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas unit organisasi dan/ atau lintas Instansi, Pejabat Fungsional atau pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.
- Rincian dan tata cara pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pada Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan.
- Tugas Tim teknis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

- Tim teknis beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan didukung pegawai PNS sebanyak 61 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja sebanyak 59 orang terdiri dari 65 orang wanita dan 55 orang pria, sehingga total pegawai sebanyak 120 orang.

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan jenis kelamin, jabatan dan tingkat pendidikan pada tahun 2025, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Jumlah PNS DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin, Jabatan dan Tingkat Pendidikan, Tahun 2025

NO	Pegawai	Jabatan/Gol	SLTA			Strata 1			Strata 2			Total
			non	II	III	non	III	IV	non	III	IV	
1	Wanita	Madya	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
		JF muda	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		JF pertama	0	0	0	0	5	0	0	6	5	16
		Pelaksana	0	0	1	0	6	0	0	0	4	11
		Total	0	0	1	0	13	0	0	6	15	35
2	Pria	Madya	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
		JF muda	0	0	0	0	2	0	0	3	3	8
		JF Pertama	0	0	0	0	2	0	0	0	3	5
		Pelaksana	0	0	0	0	4	0	0	2	1	7
		Total	0	0	0	0	8	0	0	5	13	26
	Jumlah pegawai		0	0	1	0	21	0	0	11	28	61

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan.

Dari Tabel 1.1 tersebut komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 61 orang.

Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan jenis kelamin, jabatan dan tingkat pendidikan 2025, dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1 . 2
Jumlah PPPK DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin, Jabatan dan Tingkat Pendidikan, Tahun 2025

No	Pegawai	Golongan	SLTA	DIII	STRATA 1	STRATA 2	TOTAL
1	Wanita	IX	0	0	25	0	25
		VII	0	1	0	0	1
		V	5	0	0	0	5
		Total	5	1	25	0	31
2	Pria	IX	0	0	27	0	27
		VII	0	0	0	0	0
		V	1	0	0	0	1
Total			1	0	27	0	28
Jumlah Pegawai			6	1	52	0	59

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan (diolah)

Perbedaan komposisi pegawai PNS dan PPPK pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini :

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai PNS dan PPPK DPMPSTSP Prov. Sumsel Tahun 2025

NO	Jenis Pengelompokan	Uraian	PNS		PPPK	
			Komposisi		Komposisi	
			Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
1	Berdasarkan Jenis Kelamin	Pria	26	42,62	29	49,15
		Wanita	35	57,38	30	50,85
2	Berdasarkan Golongan	Gol. IV	27	40,98	0	0
		Gol.III	34	59,02	0	0
		Gol.II	0	0	0	0
		Gol. IX	0	0	52	88,13
		Gol.VII	0	0	1	1,70
		Gol. V	0	0	6	10,17
3	Berdasarkan Pendidikan	Strata 1	38	62,30	52	88,13
		Strata 2	21	34,42	0	0
		DIII	0	0	1	1,70
		SLTA	2	3,28	6	10,17

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan

Dilihat dari tabel 1.3 tersebut, jumlah pegawai Dinas PMPTSP memiliki tambahan pegawai dari PPPK berjumlah 59 orang. Sedangkan berdasarkan pendidikan komposisi pegawai sudah cukup baik dengan 34,42% sudah mencapai strata 2, tetapi pegawai perlu dimotivasi lagi agar meningkatkan pendidikan strata 2 lebih banyak lagi. Tetapi bila dilihat berdasarkan golongan maka mayoritas pegawai gol. III lebih dominan atau mencapai 59,02% sedangkan gol. IV mencapai 40,98%. Pendidikan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah cukup baik didominasi oleh pendidikan S1 dengan 88,13% Secara keseluruhan Ini menunjukkan bahwa dukungan SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan cukup potensial untuk pelaksanaan peningkatan kinerja tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

1.5 Isu Strategis yang Dihadapi

Penentuan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pada beberapa faktor, yaitu :

- 1) Gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;
- 2) Visi, Misi, dan program kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
- 3) Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Investasi/BKPM RI;
- 4) Implikasi RTRW bagi pelayanan DPMPTSP
- 5) Implikasi KLHS bagi pelayanan DPMPTSP

Identifikasi isu strategis DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan antara Tahun 2025 – 2026 lain sebagai berikut :

1. Optimalisasi peningkatan realisasi investasi daerah

Investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menargetkan investasi sekitar Rp42,5 triliun pada tahun 2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan seperti:

- Persaingan antar daerah dalam menarik investor
- Fluktuasi investasi asing (PMA)
- Keterbatasan promosi potensi investasi daerah

Padahal realisasi investasi Sumsel tahun 2025 tercatat sekitar Rp. 62,67 triliun yang berasal dari PMA dan PMDN dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 61 ribu orang.

2. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha

Transformasi sistem perizinan melalui OSS berbasis risiko (Online Single Submission) menuntut:

- pelayanan yang lebih cepat dan transparan
- integrasi perizinan antara pusat dan daerah
- peningkatan kompetensi aparatur pelayanan perizinan.

Masih terdapat tantangan seperti:

- proses integrasi sistem
 - pemahaman pelaku usaha terhadap OSS
 - standar pelayanan yang belum merata.
3. Penguatan promosi dan potensi investasi daerah Sumatera Selatan memiliki banyak potensi investasi seperti:
- industri pengolahan
 - pertambangan dan energi
 - perkebunan dan agroindustri
 - logistik dan transportasi.

Namun potensi tersebut belum sepenuhnya terpromosikan secara optimal kepada investor nasional maupun internasional.

4. Penguatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
- Pengawasan terhadap realisasi investasi perlu ditingkatkan melalui:
- pengendalian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)
 - monitoring proyek investasi
 - penyelesaian hambatan investasi (debottlenecking).

Hal ini penting agar investasi yang telah memperoleh izin benar-benar terealisasi.

5. Peningkatan kemudahan berusaha dan iklim investasi Masih terdapat kendala yang dihadapi investor seperti :
- tumpang tindih regulasi
 - proses administrasi lintas instansi
 - ketersediaan lahan dan infrastruktur pendukung.

Oleh karena itu perlu peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

6. Pemanfaatan proyek strategis dan pembangunan infrastruktur
- Pembangunan infrastruktur dan proyek strategis daerah menjadi peluang untuk meningkatkan investasi di wilayah Sumatera Selatan, seperti:
- pengembangan pelabuhan baru
 - pembangunan jalan tol dan konektivitas wilayah
 - pengembangan kawasan industri.

Kesimpulan :

Isu strategis utama DPMPTSP Sumatera Selatan pada 2025–2026 berfokus pada:

1. Perlunya optimalisasi peningkatan realisasi investasi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama pada sektor-sektor unggulan daerah seperti energi, pertanian, perkebunan, dan pariwisata;
2. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan perizinan, dikarenakan masih lemahnya transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui pemanfaatan penuh sistem OSS-RBA sesuai PP 28 Tahun 2025 dan inovasi kemudahan berusaha;
3. Kurangnya upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam memberikan pelayanan prima dan adaptif terhadap perkembangan regulasi serta teknologi informasi;
4. Keterbatasan anggaran dan infrastruktur penunjang investasi, yang berdampak pada pelaksanaan promosi, fasilitasi investasi daerah dan investasi di sektor hilirisasi;
5. Masih lemahnya penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor serta antarlevel pemerintahan dalam mendorong percepatan penyelesaian hambatan investasi dan kemudahan berusaha;
6. Masih rendahnya implementasi fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM di daerah untuk mendorong peningkatan daya saing
7. Masih rendahnya implementasi kemudahan investasi dengan pemberian insentif/fasilitasi kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.
8. Masih kurang optimalnya Promosi potensi investasi daerah.
9. Masih kurang optimalnya Pengawasan pelaksanaan investasi.
10. Perlunya Perbaikan iklim usaha.
11. Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur dan kawasan ekonomi.

1.6 Sistematika Penyusunan LKjIP

Susunan dan Sistematika Penyusunan LKjIP sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang penjelasan umum organisasi, dasar hukum, maksud dan tujuan, uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, isu strategis yang dihadapi dan sistematika penyusunan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB ini membahas tentang

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran

Visi dan Misi pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 didasarkan pada hasil analisis Visi dan Misi, arah kebijakan dan sasaran pokok ke-IV Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yaitu mewujudkan visi “**Sumsel Maju Terus Untuk Semua** “. Kemudian dengan memperhatikan isu strategis krusial di wilayah provinsi Sumatera Selatan, maka dirumuskanlah 1 tujuan dan tujuan tersebut ditetapkan sasaran-sasaran beserta indikatornya.

Dengan berpedoman pada rumusan tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 tersebut, dukungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan diprioritaskan pada :

Misi II: Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.

Tujuan ke-2 : Terwujudnya daya saing dan ketahanan ekonomi daerah. Terciptanya kondisi ekonomi yang stabil dan berdaya saing sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dan persaingan baik di tingkat regional dan nasional dengan mengembangkan ekonomi sektor unggulan daerah dan hilirisasi produk.

Sasaran ke-7: Meningkatnya investasi dan perdagangan daerah

Misi VI: Meningkatkan Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas

Tujuan ke-9 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan (good governance) merupakan struktur dan proses tata kelola yang terdapat dalam instansi pemerintahan. Peningkatan tata kelola pemerintahan diperlukan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan yang

meliputi peningkatan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta peningkatan kapabilitas dan integritas aparatur pemerintah daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Sasaran ke-2: Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam dokumen Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Adapun **tujuan** Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan adalah **“Meningkatnya Kontribusi Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan”** dengan **indikator keberhasilan pencapaian tujuan:**

1) Rasio pembentukan modal tetap bruto (%PMTB)

2) Persentase pertumbuhan investasi (%)

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka ditetapkanlah **2 (dua) sasaran strategis utama** antara lain:

1. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing,
dengan

indikator :

- a) Realisasi Investasi Total
- b) Persentase peningkatan proyek investasi baru

2. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang prima dan berbasis

digitalisasi, dengan indicator :

- a) Indeks Kepuasan Investor
- b) Persentase perizinan/Nonperizinan berbasis digital yang diselesaikan tepat waktu

Dari kedua sasaran utama tersebut kemudian ditetapkanlah 5 sasaran strategis dan beberapa sasaran dimasing-masing sasaran strategis beserta indikatornya sebagai tolak ukur pengukuran kinerjanya.

Penjabaran tujuan dan seluruh sasaran tersebut tertuang dalam Cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 dan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 yang kemudian menjadi dasar penyusunan Indikator Kinerja Utama perangkat daerah dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025-2029.

Pada Tahun 2025 DPMPTSP Provinsi mengalami perubahan Indikator Kinerja Utama, hal ini disebabkan karena pada saat awal tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalami transisi perubahan kepala daerah, sehingga pengukuran Indikator Kinerja utama masih merujuk kepada RPD Tahun 2024-2026. Setelah adanya kepala daerah terpilih Tahun 2025-2029 maka Dokumen RPD tahun 2024-2026 berubah menjadi Dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2025-2029, dengan perubahan Indikator Kinerja Utama nya dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Sebelum perubahan
(RPD 2024-2026)

Tujuan OPD : Meningkatkan Investasi Daerah			Penjabaran Target				
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
1	Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif	Persentase pertumbuhan investasi (%)	8	2	2	2	2
		Nilai realisasi investasi PMA (T)	20,0	5	5	5	5
		Nilai realisasi investasi PMDN (T)	22,5	5,63	5,63	5,63	5,63
		Jumlah Investor (Unit usaha)	1.200	300	300	300	300
2	Meningkatnya kualitas pelayanan investasi yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (angka)	90,25	89,29	85,59	89,95	90,25
		Jumlah perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP	2.500	300	600	800	-

Sumber: RPD DPMPTSP Tahun 2024-2026

Berdasarkan tabel 2.1 Indikator kinerja utama DPMPTSP berdasarkan RPD Tahun 2024-2026. Target dan realisasi TW I-TW III tahun 2025 menggunakan IKU RPD 2024-2026 sementara untuk target dan realisasi pada TW IV berdasarkan pada Renstra (Rencana Strategis) 2025-2029.

Adapun target IKU setelah perubahan dapat dilihat pada tabel 2.2 dan target IKK tahun 2025 pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Setelah perubahan
(Renstra 2025-2029)

Tujuan OPD : Meningkatkan Kontribusi Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan			Penjabaran Target				
NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
1	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PMTB)	%	30,50	7,50	15,25	23,00	30,50
2	Persentase Pertumbuhan Investasi	%	7.5	1,87	1,87	1,87	1,87

Sumber : IKU Renstra DPMPTSP Provinsi Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 seperti tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Realisasi Investasi PMA	Triliun Rp	20.00	21.00	22.05	23.15	24.31	25.53
2	Nilai Realisasi Investasi PMDN	Triliun Rp	22.50	23.63	24.81	26.05	27.35	28.72
3	Realisasi Investasi Total	Triliun Rp	42.50	44.63	46.86	49.20	51.66	54.24
4	Persentase peningkatan proyek investasi baru	%	5	6	6	7	7	7
5	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan sesuai SOP	%	10	10	15	15	20	20
6	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	80	82	84	86	88	90
7	Indeks Kepuasan Investor	angka	89.97	90	90.05	90.15	90.25	90.3
8	Realisasi Total investasi terhadap target investasi	%	100	100	120	120	125	130
9	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang di hadapi pelaku usaha	%	70	70	75	75	80	80
10	Jumlah fasilitasi rencana proyek penanaman modal	angka	2	2	2	2	2	2
11	Jumlah kemitraan antara UMKM/koperasi dengan Perusahaan besar/BUMN/BUMD	angka	16	22	30	38	46	50

Sumber: Renstra DPMPTSP Provinsi Tahun 2025-2029

CORE BUSINESS/AREA



Sumber :Dokumentasi Pokja Dalak

Gambar 2.1
OKI Pulp & Paper

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan lebih menitik beratkan pada sasaran mewujudkan iklim investasi yang kondusif berdaya saing dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang prima dan berbasis digitalisasi. Oleh karena itu untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut perlu didukung dengan program dan kegiatan yang saling berkaitan dan dilengkapi juga dengan Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana serta fasilitas pendukung lainnya.

2.2 Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Perjanjian kinerja perangkat daerah tahun 2025 ini merupakan bagian dari target yang lebih strategis yaitu pencapaian target tahunan dari target RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diambil dari Indikaator Kinerja Utama memuat Indikator dan target Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum perubahan dan setelah perubahan dapat dilihat pada tabel 2.4 dan 2.5 di bawah ini :

Tabel 2.4
Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sebelum perubahan
(RPD 2024-2026)

Tujuan OPD : Meningkatkan Investasi Daerah			Penjabaran Target				
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
1	Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif	Persentase pertumbuhan investasi (%)	7,5	1,875	1,875	1,875	1,875
		Nilai realisasi investasi PMA (T)	22,0	5	5	5	5
		Nilai realisasi investasi PMDN (T)	22,5	5,63	5,63	5,63	5,63
		Jumlah Investor (Unit usaha)	1200	300	300	300	300
2	Meningkatnya kualitas pelayanan investasi yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (angka)	91,81	89,29	85,59	89,95	90,25
		Jumlah perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP	2500	300	600	800	-

Sumber: RPD DPMPTSP Tahun 2024-2026

Tabel 2.5
Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Setelah perubahan
(Renstra 2025-2029)

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Target
Tujuan : Meningkatnya Kontribusi Investasi Terhadap Perekonomian Sumsel			
1.	Meningkatnya Kontribusi Investasi Terhadap Perekonomian Sumsel	3 indikator : 1. Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 2. Persentase Pertumbuhan Investasi	31,16% 7,5%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Provinsi Sumsel	3. Nilai SAKIP DPMPTSP Provinsi Sumsel	82

Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala DPMPTSP Tahun 2025

Selain Indikator Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja kunci dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah ini :

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Realisasi Investasi PMA	Triliun Rp	20.00	21.00	22.05	23.15	24.31	25.53
2	Nilai Realisasi Investasi PMDN	Triliun Rp	22.50	23.63	24.81	26.05	27.35	28.72
3	Realisasi Investasi Total	Triliun Rp	42.50	44.63	46.86	49.20	51.66	54.24
4	Persentase peningkatan proyek investasi baru	%	5	6	6	7	7	7
5	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan sesuai SOP	%	10	10	15	15	20	20
6	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	80	82	84	86	88	90
7	Indeks Kepuasan Investor	angka	89.97	90	90.05	90.15	90.25	90.3
8	Realisasi Total investasi terhadap target investasi	%	100	100	120	120	125	130
9	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha	%	70	70	75	75	80	80
10	Jumlah fasilitasi rencana proyek penanaman modal	angka	2	2	2	2	2	2
11	Jumlah kemitraan antara UMKM/koperasi dengan Perusahaan besar/BUMN/BUMD	angka	16	22	30	38	46	50

Sumber data : IKK Renstra DPMPTSP Provinsi Tahun 2025-2029

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas dapat dilihat ada beberapa IKU sebelum perubahan pada tabel 2.4 menjadi IKK pada tabel 2.6. Sehingga untuk target pada TW IV mengalami perubahan berdasarkan kinerja yang terdapat didalam dokumen Renstra 2025-2029. Indikator yang mengalami perubahan diantaranya adalah peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan sesuai SOP Pada RPD tahun 2024-2026 menggunakan indikator Jumlah perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP, sedangkan pada Renstra 2025-2029 menjadi persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan sesuai SOP. Jumlah investor tidak ada lagi pada renstra 2025-2029.

Untuk mendukung pencapaian indikator dan target yang telah ditetapkan tersebut maka Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan disusun secara berjenjang mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris, Pejabat Fungsional Ahli Madya yang setara dengan Esselon III, Pejabat Fungsional Ahli Muda setara dengan Esselon IV dan dan seluruh Fungsional Ahli Pertama beserta staf pelaksana (fungsional umum) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja. Dari Perjanjian Kinerja yang disusun oleh seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan tersebut, kemudian dilaksanakan pengukuran kinerja secara berjenjang melalui aplikasi E-Kinerja BKN. Pada aplikasi E-Kinerja tersebut sasaran dan indikator yang tercantum didalam perjanjian kinerja menjadi dasar pencapaian target kinerja masing-masing pegawai ASN tersebut.

2.3 Langkah Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan pada tahun ini menyusun langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan prima di seluruh sektor pelayanan;
2. Memberikan kemudahan kepada para calon investor mendapatkan informasi peluang investasi penanaman modal daerah;
3. Meningkatkan kinerja investasi daerah melalui peran serta seluruh pemangku kepentingan lingkup OPD dan koordinasi antar OPD;
4. Meningkatkan kepatuhan investor melalui pengawasan, pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaku usaha;

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan perizinan dan ruang lingkup kerja perangkat daerah;
6. Meningkatkan kualitas promosi penanaman modal daerah;
7. Melaksanakan penyederhanaan jabatan administrasi ke jabatan fungsional sesuai regulasi yang telah ditetapkan kualitas SDM perangkat daerah melalui pelatihan, bimtek, diklat baik teknis/non teknis dan peningkatan kapasitas SDM melalui reposisi sesuai kompetensi yang dimiliki;
8. Meningkatkan kualitas SDM perangkat daerah melalui pelatihan, bimtek, diklat baik teknis/non teknis, dan peningkatan kapasitas SDM melalui reposisi sesuai kompetensi yang dimiliki
9. Meningkatkan kinerja perencanaan, pengelolaan keuangan dan tata laksana dalam mendukung peningkatan kinerja perangkat daerah lebih baik lagi.

Langkah strategis ini akan dilaksanakan secara bertahap selama periode tahun 2025 dalam rangka mewujudkan kinerja perangkat daerah lebih baik lagi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban suatu instansi perangkat daerah untuk menjelaskan, mengukur capaian kinerja selama 1 Tahun secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ kepala daerah sebagai pemberi amanah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 merupakan laporan yang disusun berdasarkan RPD Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029. Laporan ini disusun berdasarkan kontribusi capaian kinerja pada tim kerja yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

Secara Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029. Berikut pada tabel 3.1 disajikan realisasi TW I-TW III berdasarkan RPD Tahun 2024-2026, dan realisasi TW IV berdasarkan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Sebelum
Perubahan (RPD 2024-2026)

Tujuan OPD : Meningkatkan Investasi Daerah			Penjabaran Target						Realisasi			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4	2025	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
1	Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif	Persentase pertumbuhan investasi (%)	8	1,76	1,92	2,48	1,84	-11,63	-2,97	-3,06	77,23	-11,63
		Nilai realisasi investasi PMA (T)	20,0	5	5	5	5	15,74	3,88	4,45	2,78	4,37
		Nilai realisasi investasi PMDN (T)	22,5	5,63	5,63	5,63	5,63	47,19	9,84	8,22	20,65	8,48
		Jumlah Investor (Unit usaha)	1200	300	300	300	300	2.392	1291	1910	1369	1265
2	Meningkatnya kualitas pelayanan investasi yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (angka)	90,25	89,29	85,59	89,95	90,25	91,81	88,67	89,79	91,17	91,81
		Jumlah perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP	2500	300	600	800	800	2.224	440	546	900	338

Sumber: Laporan Kinerja Triwulan I s.d Triwulan IV Tim Kerja PP dan PKPM

Pada Tabel 3.1 diatas dapat dilihat bahwa Pada sasaran Strategis Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dengan indikator Persentase Pertumbuhan investasi pada tahun 2025 realisasinya -11,63%. Secara keseluruhan, penurunan pertumbuhan investasi Sumatera Selatan tahun 2025 sebesar -11,63% lebih mencerminkan perlambatan yang bersifat struktural-administratif dan siklus proyek, bukan penurunan minat investasi secara fundamental. Kondisi ini menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan penguatan iklim investasi, peningkatan peran daerah dalam pengawasan, serta perbaikan mekanisme pencatatan realisasi investasi ke depan.

Jumlah investor (unit usaha) pada tahun 2025 berjumlah 2392 dari target 1200 unit usaha/ perusahaan, dengan capaian mencapai 199,33%.

Indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026 seperti yang tertuang pada tabel 3.1 tersebut diatas mengalami perubahan yang tercantum pada dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan pencapaian kinerja sasaran dirinci pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Capaian Kinerja Utama Tahun 2025 Setelah Perubahan
(Renstra 2025-2029)

Tujuan OPD : Meningkatnya Kontribusi Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan			Penjabaran Target					Realisasi				
NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4	2025	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
1	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PMTB)	%	30,50	7,50	15,25	23,00	30,50	30,02	7,32	14,98	22,65	30,02
2	Persentase Pertumbuhan Investasi	%	7.5	1,65	1,8	2,325	1,725	-11,63	-2,97	-3,06	77,23	-11,63

Sumber: Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Sekretariat

Berdasarkan tabel 3.2 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 menunjukkan kinerja investasi yang kuat dan stabil. Berdasarkan evaluasi capaian indikator makro daerah, pertumbuhan PMTB Tahun 2025 tercatat sebesar 30,02%, mendekati target tahunan sebesar 30,50%, dengan tingkat capaian 98,43% dari target yang ditetapkan.

Realisasi capaian indikator kinerja kunci DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025 Setelah Perubahan
(Renstra 2025-2029)

No	INDIKATOR	SATUAN	Penjabaran Target					Realisasi				
			2025	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4	2025	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
1	Nilai Realisasi Investasi PMA	T Rp	20.00	5	5	5	5	15,74	3,88	4,45	2,78	4,37
2	Nilai Realisasi Investasi PMDN	T Rp	22.50	5,625	5,625	5,625	5,625	47,19	9,84	8,22	20,65	8,48
3	Realisasi Investasi Total	T Rp	42.50	10,63	10,63	10,63	10,63	62,67	13,72	12,67	23,43	12,85
4	Persentase pertumbuhan Investasi	%	7.5	1,87	1,87	1,87	1,87	-11,63	-2,97	-3,06	77,23	-11,63
5	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan sesuai SOP	%	10	-	-	-	10	-	-	-	-	48,27
7	Indeks Kepuasan Investor	angka	89,97	89,29	89,59	89,95	90,25	91,81	88,67	89,79	91,17	91,81

Sumber: Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Sekretariat

Berdasarkan tabel 3.3 indikator persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan sesuai SOP pada TW IV sudah mengikuti target dalam dokumen renstra DPMPTSP tahun 2025-2029. Target persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan sesuai SOP adalah 10% dengan jumlah izin awal 1500. Pada realisasinya izin yang berhasil diterbitkan adalah 2224 izin dengan realisasi capaian 48,27%.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian sumsel

Sasaran 1: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif berdaya saing

Untuk mencapai sasaran Mendorong Terciptanya iklim investasi yang kondusif dapat dilihat dari 2 (dua) indikator sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Sasaran Utama 1 Tahun 2025

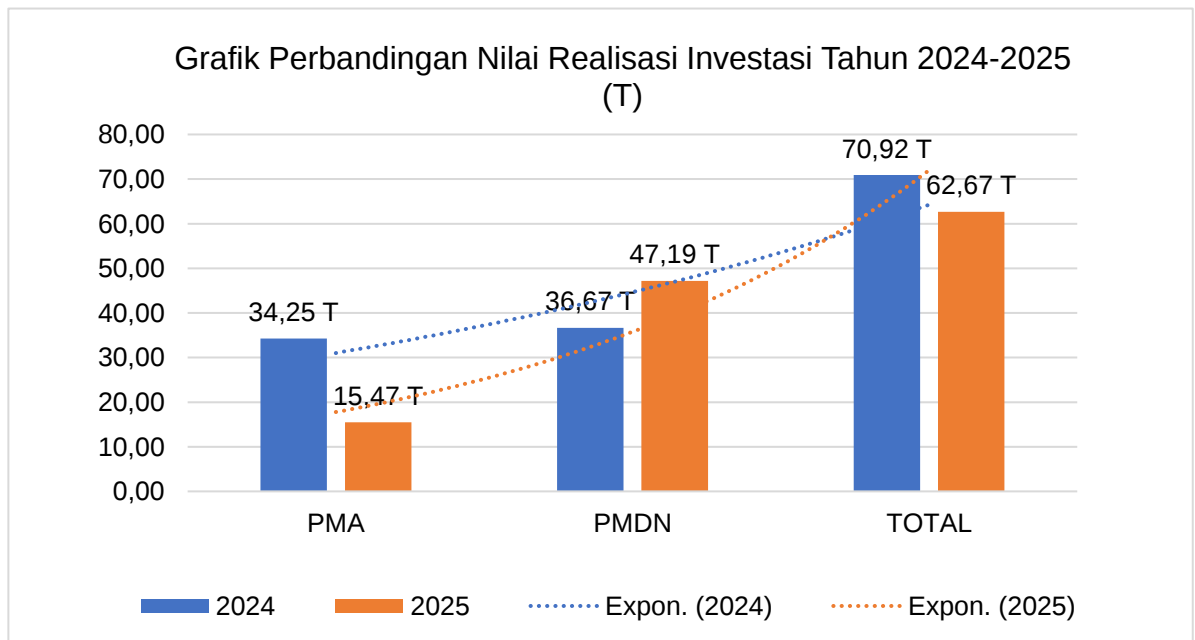
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Realisasi Ivestasi Total	T Rp	42,50	62.67	147,46%
	Nilai Realisasi Investasi PMA	T Rp	20,0	15.48	77,4%
	Nilai Realisasi Investasi PMDN	T Rp	22,5	47.19	209,73%
2	Persentase Peningkatan Proyek Investasi Baru	%	5	2,32	46,4%

Sumber: Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Pengendalian PM dan Promosi PM

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran pada tabel 3.4 tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa indikator sasaran realisasi investasi PMA dan PMDN triwulan I sampai dengan triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp. 62,67 T atau tercapai 79,48% dari target investasi Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan Pemerintah Pusat untuk tahun 2025 sebesar Rp. 78,85 T, dan tercapai 147,46% dari target Pemerintah Daerah Rp. 42,5 T. Apabila dibandingkan dengan data realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN) tahun 2024, total realisasi investasi tercatat sebesar Rp.70,92 T. Sementara itu, pada tahun 2025 realisasi investasi PMA dan PMDN mencapai Rp. 62,67 T. Kondisi ini menunjukkan terjadinya perlambatan realisasi investasi pada tahun 2025, yaitu sebesar –11,63% apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, dan masih berada di bawah target pertumbuhan investasi yang ditetapkan sebesar 7,5%. Perlambatan kinerja investasi pada tahun 2025 ini terjadi pada investasi PMA dengan perlambatan sebesar 54,83% dari tahun 2024.

Perbandingan nilai realisasi investasi tahun 2024-2025 dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini:



Sumber : Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Promosi PM

Gambar 3.1.

Grafik Perbandingan Nilai Realisasi Investasi Tahun 2024-2025

Apabila dibandingkan antara realisasi capaian kinerja sasaran 1 tahun 2025 dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 1 dari
Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi					Capaian (%)				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Realisasi PMA	T	18,39	17,77	21,88	34,25	15,47	96,13	85,97	99,90	175,64	77,35
2.	Realisasi PMDN	T	16,27	23,52	25,60	36,67	47,19	178,01	85,97	244,50	166,68	209,75
3	Jumlah Investor	Perusahaan	884	1203	3505	4,454	2,392	154,74	270,07	229,26	387,30	191,36
4	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	-9,63	18,96	15,97	49,37	-11,63	1,37	646,86	220,85	617,12	-155,06

Sumber : Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2021 s.d 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Promosi PM

Realisasi Kinerja tahun 2025 bila dibandingkan dengan target Rencana strategis Pembangunan Daerah Renstra DPMPTSP 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini :

Tabel 3.6
Perbandingan realisasi kinerja sasaran 1 dari tahun 2025 dengan
target jangka menengah

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Target Jangka Menengah s.d Tahun 2029	Persentase Tingkat Capaian (%)
1		2	3	4	5
1	Nilai Realisasi Investasi PMA	T	15,47	24,31	63,63
2	Nilai Realisasi Investasi PMDN	T	47,19	27,35	172,54
3	Jumlah Investor/ LKPM	Perusahaan	2,392	7.828	30,56
4	Persentase Pertumbuhan Nilai Invetasi	%	-11,63	8	-145,37

Sumber: Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Promosi PM

Tabel 3.7
Perbandingan realisasi kinerja sasaran 1 dari tahun 2025 dengan
standar nasional

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Standar Nasional	Persentase Tingkat Capaian (%)
1		2	3	4	5
1	Nilai Realisasi Investasi	T	62,67	78,85	79,48

Sumber : Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Pengendalian PM

Berdasarkan tabel 3.7 diatas nilai realisasi investasi Sumatera Selatan tahun 2025 sebesar 62,67 T atau mencapai 79,48% dari target investasi Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan Pemerintah Pusat untuk tahun 2025 sebesar 78,85 T dan tercapai 147,46% dari target Renstra Tahun 2025-2029 sebesar 42,50 T. Pencapaian realisasi PMA dan PMDN pada tahun 2025 ini didukung capaian realisasi PMA sebesar Rp. 15.474.319.982.407,00 (Rp. 15,47 T) dan realisasi PMDN sebesar Rp. 47.193.731.155.747,00 (Rp. 47,19 T).

Total nilai investasi provinsi Sumatera Selatan berdasarkan wilayah per Kabupaten/Kota pada periode triwulan I s.d triwulan IV Tahun 2025 untuk Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 15,47 T atau melambat 54,83% bila dibandingkan capaian realisasi PMA triwulan I s.d IV tahun 2024 (Y/Y)

Adapun langkah-langkah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan realisasi investasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemantauan dan verifikasi data investasi dengan indikator Jumlah LKPM yang disampaikan Perusahaan secara online dengan tepat waktu. Pencapaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025 ini sebesar 863,06% dengan jumlah LKPM adalah 6.473 LKPM yang terdiri dari 6.072 LKPM PMDN dan 401 LKPM PMA. Rekapitulasi jumlah LKPM dari Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini :

Tabel 3.8
Rekapitulasi Jumlah LKPM Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2025

Jenis PM	Jumlah LKPM					Jumlah Perusahaan				
	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	TW 1	TW2	TW3	TW 4	Total
PMA	461	432	511	401	1.805	176	165	181	150	672
PMDN	6.074	9.225	6.646	6.072	28.017	1.115	1.745	1.188	1.115	2.164
Total	6.535	9.657	7.157	6.473	29.822	1.291	1.910	1.369	1.265	2.392

Sumber: Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Promosi PM

- Meningkatkan fasilitasi penyelesaian masalah pelaku usaha (PMA/PMDN) dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah jumlah fasilitasi kendala pelaku usaha. Untuk realisasi kinerja pada triwulan IV tahun 2025 ini tercapai sebanyak 127 pelaku usaha/perusahaan yang dibina dimana 100 pelaku usaha/Perusahaan yang dibina melalui bimbingan teknis/sosialisasi dan 27 pelaku usaha/Perusahaan yang dibina oleh tenaga pendamping seperti pada tabel 3.7. Sedangkan kegiatan usaha yang telah difasilitasi permasalahannya sebanyak 9 pelaku usaha. Untuk realisasi kinerja pada tahun 2025 ini tercapai 386 pelaku usaha/Perusahaan yang dibina, Dimana 300 pelaku usaha/Perusahaan yang dibina melalui Bimbingan Teknis/Sosialisasi, 9 pelaku usaha/perusahaan yang dibina melalui fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha dan 77 pelaku usaha/Perusahaan dilakukan pendampingan kepada pelaku usaha oleh tenaga pendamping.

Rekapitulasi Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.9 di bawah ini :

Tabel 3.9
Rekapitulasi Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Tahun 2025

Pembinaan Kepada Pelaku Usaha	Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	Total
Bimbingan Teknis/Sosialisasi	0	100	100	100	300
Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan	0	0	3	6	9
Pendampingan Kepada Pelaku Usaha oleh Tenaga Pendamping	19	17	14	27	77
Total	19	118	117	133	386

Sumber: Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Promosi PM

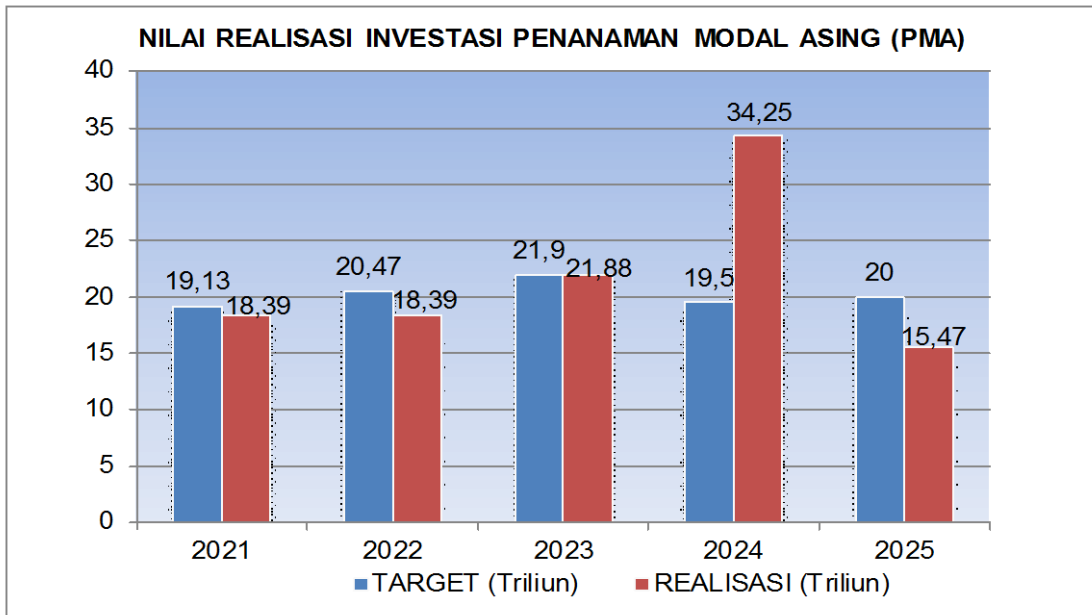


Sumber: Laporan kinerja triwulan iv pokja pengendalian PM

Gambar 3.2

Identifikasi penyelesaian permasalahan ke PT. Prasadha Aneka Limbah Indonesia di Kab. Penukal Abab Lematang Ilir

Capaian target dan realisasi indikator investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dari tahun 2021 s.d 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini

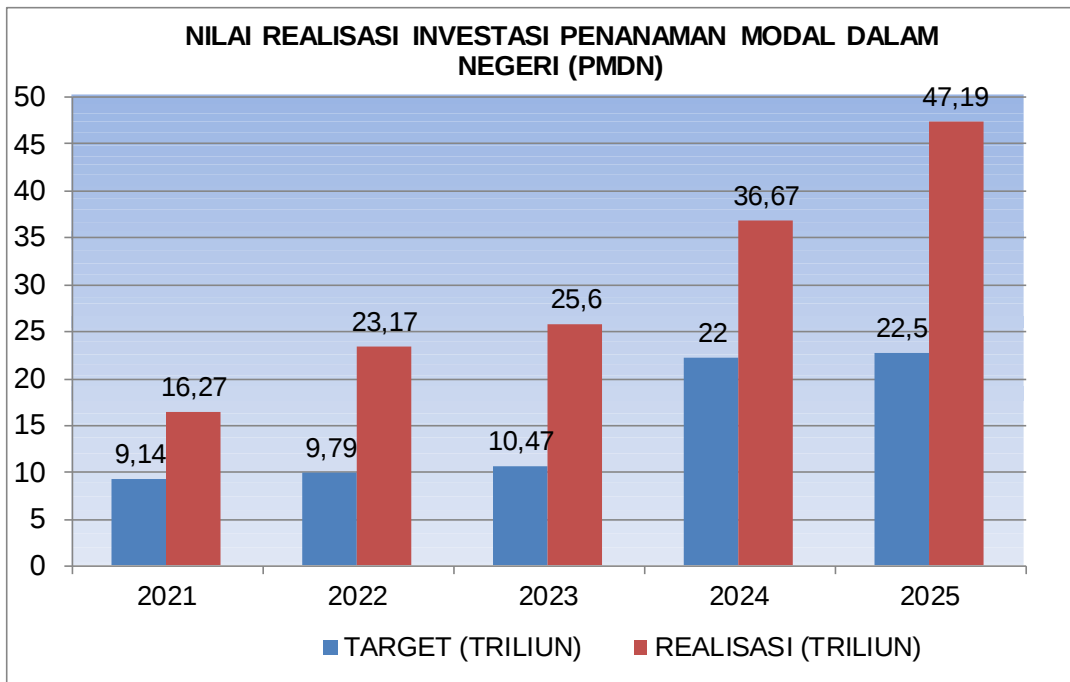


Sumber : Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Promosi PM

Gambar 3.3
Grafik Target dan Realisasi Investasi PMA Tahun 2021-2025

Berdasarkan gambar 3.3 total nilai realisasi investasi Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan wilayah per kab/kota pada Tahun 2025 untuk Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 15.474.319.982.407,00 (Rp. 15,47 T) atau mengalami penurunan 54,83% yaitu Rp. 18.774.632.304.404,10 (Rp. 18,77 T) bila dibandingkan capaian realisasi PMA triwulan I s.d triwulan IV tahun 2024 (Y/Y). Nilai Realisasi Investasi PMA Tahun 2025 tertinggi didominasi oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Realisasi Investasi sebesar Rp. 9.274.228.386.785,00 (Rp. 9,27 T).

Capaian target dan realisasi indikator Investasi PMDN dari tahun 2021 s.d 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Sumber: Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Promosi PM

Gambar 3.4
Grafik Target dan Realisasi Investasi PMDN Tahun 2021-2025

Berdasarkan gambar 3.4 indikator kinerja nilai realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2025 adalah 47,19 T dari target sebesar 22,50 T dengan persentase capaian 209,73% sementara target akhir Renstra (2029) adalah 51,66 T, terlihat bahwa realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 sudah mencapai 91,35 % dari target akhir Renstra.

Terlampauinya target Investasi PMDN seperti yang telah ditetapkan Renstra untuk target tahun 2025, Adapun faktor pendukung Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yaitu :

1. Peningkatan citra daerah sebagai tujuan investasi wilayah yang lebih spesifik dan konkret popularitas berbagai aspek

2. Pengemasan potensi dan peluang investasi wilayah yang lebih spesifik dan konkret Investment Project Ready To Offer (IPRO) .
3. Pengembangan mekanisme promosi investasi yang lebih efisien dan efisien antara lain :
 - a. Penyelarasan kegiatan promosi Tourism, Trade and Investment (TTI) dengan OPD terkait.
 - b. Peningkatan penggunaan media elektronik yang meliputi podcast, televisi, media online dan media sosial.
4. Pelaksanaan gelar promosi investasi untuk mendorong investor awaranness and willingness.
5. Fasilitasi keikutsertaan UKM pada saat promosi dalam rangka matchmaking dengan perusahaan skala besar serta pembinaan kemitraan usaha dengan strategi naik kelas/alianasi.
6. Kerjasama dengan pusat promosi terpadu di Negara-negara tertentu.

Salah satu upaya untuk mendukung pencapaian kinerja realisasi investasi PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) terhadap target Tahun 2025 yaitu dengan mewujudkan Sasaran Strategis Meningkatnya pengendalian Penanaman Modal. Ada empat upaya pencapaian sasaran yang dilakukan antara lain :

- a. Meningkatkan pemantauan dan verifikasi data investasi dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah Jumlah LKPM yang disampaikan perusahaan secara online dengan tepat waktu;
- b. Meningkatkan fasilitas penyelesaian masalah pelaku usaha (PMA/PMDN) dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah jumlah fasilitasi kendala pelaku usaha.
- c. Meningkatkan pembinaan perusahaan (PMA/PMDN) dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah jumlah pelaku usaha yang dibina sesuai ketentuan pelaksanaan penanaman modal (Gambar 3.5).
- d. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah

Jumlah perusahaan yang diawasi dengan mekanisme Berita Acara Pemeriksaan (BAP).



Sumber : Laporan kinerja triwulan III Tahun 2025 Pengendalian PM dan Promosi PM

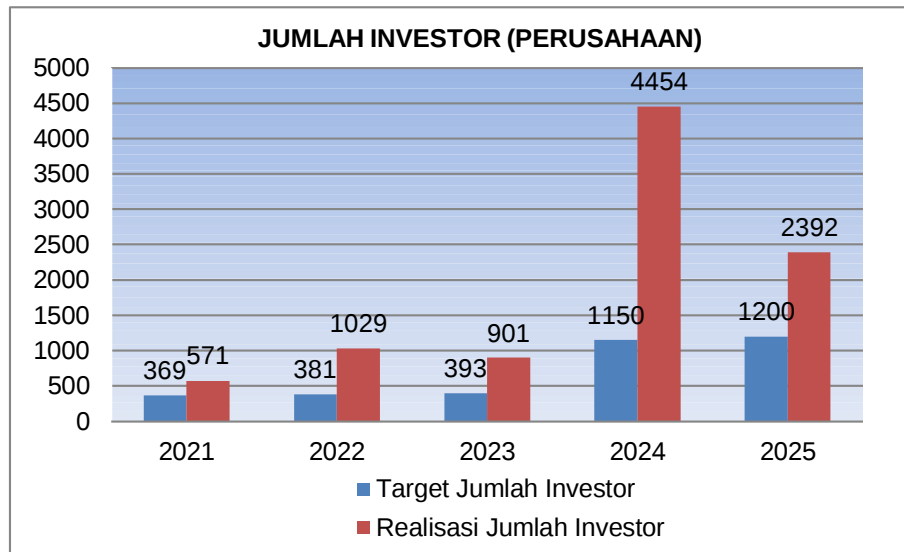
Gambar 3.5
Kegiatan Pembinaan perusahaan PMA/PMDN



Sumber : Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 Pengendalian PM

Gambar 3.6
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ke PT. Muba
Global Lestari di Kab. Musi Banyuasin

Capaian target dan realisasi indikator jumlah investor dari tahun 2021 s.d 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Sumber: Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Promosi PM

Gambar 3.7
Grafik Jumlah Investor pada Tahun 2021-2025

Berdasarkan Gambar 3.7 realisasi indikator jumlah investor tahun 2025 adalah 2.392 Perusahaan dari target sebesar 1.200 Perusahaan dengan capaian sebesar 199,33%. Apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya mengalami penurunan dimana tahun 2024 realisasi 4.454 dari target sebesar 1.150 dan capaian 387,30%.

Jumlah Investor sangat berpengaruh terhadap besarnya nilai investasi serta tenaga kerja yang terserap di daerah Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah investor yang menanamkan modal di daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 berjumlah 2392 Perusahaan. Jumlah Investor pada tahun 2025 menurun sebesar 53,70 % apabila dibandingkan dengan jumlah investor pada tahun 2024. Jumlah investor pada tahun 2024 adalah 4.454 Perusahaan.

Jika dilihat berdasarkan bidang usaha sektor yang paling dominan adalah sektor sekunder (10,69 T) dengan penyumbang terbesar adalah sektor kertas dan percetakan terutama pada Industri bubur kertas dan

barang dari kertas, Sub sector Industri makanan terutama industri kelapa sawit.

Untuk terus meningkatkan capaian realisasi investasi yang berasal dari PMA (Penanaman Modal Asing), DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
2. Sosialisasi tentang tata cara pendaftaran dan pelaporan pada SPIISE Online untuk melaporkan kegiatan investasi perusahaan dalam bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

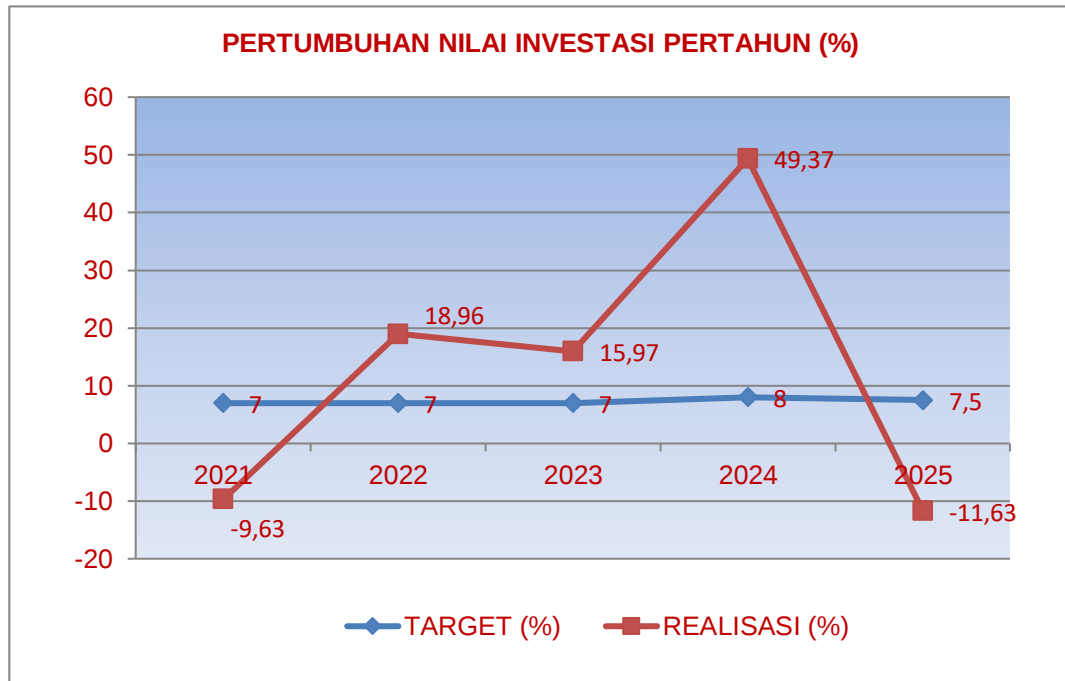


Sumber : Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Promosi PM

Gambar 3.8
Business Matching antara *Crude Coconut Oil* (CCO) dan Pemerintah Provinsi Sumsel

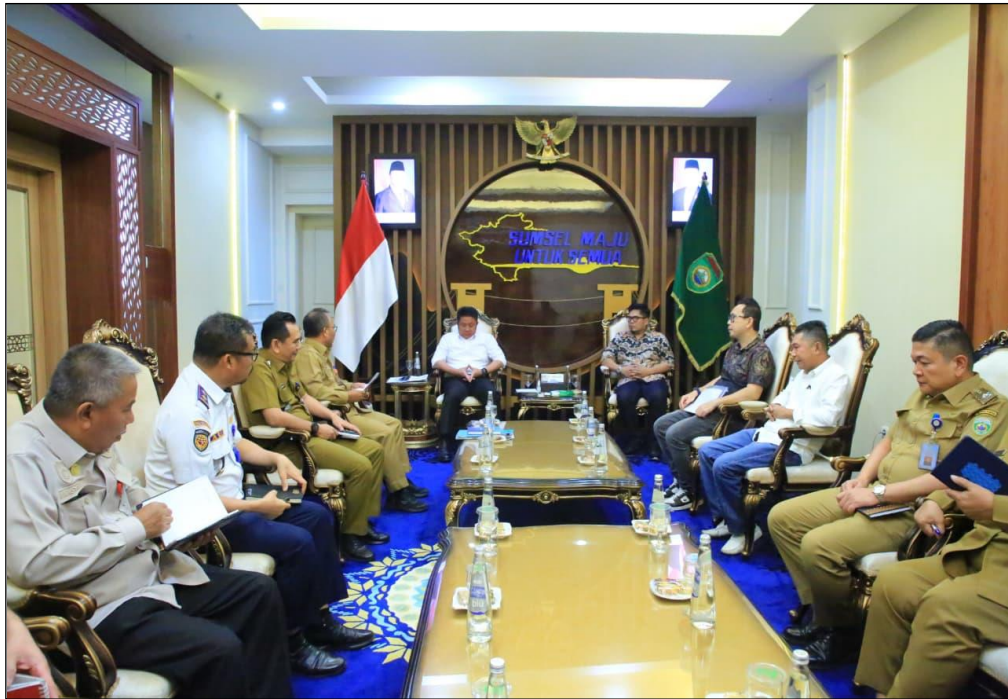
Indikator pertumbuhan nilai investasi pada tahun 2025 sebanyak - 12,06 dihitung dengan Total realiasi Investasi Tahun n-Total realiasasi tahun sebelumnya dibagi Total Invesatasi tahun sebelumnya, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 mengalami penurunan dimana tahun 2024 realisasi sebesar 49,37 dari target 8% dengan persentase capaian 617,12%. Sementara target akhir Renstra (2029) adalah 1.250

perusahaan, terlihat bahwa realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 belum mencapai target akhir Renstra (2029). Pertumbuhan Nilai Investasi dari Tahun 2021-2025 dapat di lihat pada grafik dibawah ini :



Sumber: Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Promosi PM

Gambar 3.9
Grafik Pertumbuhan Nilai Investasi Tahun 2021-2025



Sumber : Dokumentasi sekretariat Dpmtsp Prov. Sumsel dan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Pokja Promosi PM

Gambar 3.10
Pembahasan Kerjasama Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik bersama PT. Vgreen Global Charging Station Investment Indonesia dengan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan

Kegiatan business matching antara calon investor pelaku usaha besar maupun kecil baik dalam dan luar negeri beserta UMKM dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya mempertemukan kebutuhan investasi dengan potensi daerah secara langsung dan terarah. Kegiatan ini menjadi wadah komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan calon investor/pelaku usaha guna memperoleh informasi yang komprehensif terkait peluang investasi, kemudahan perizinan, dukungan infrastruktur, serta kebijakan insentif yang tersedia di Provinsi Sumatera Selatan.

Melalui forum ini, pelaku usaha dapat menyampaikan rencana investasi, kebutuhan lahan, bahan baku, tenaga kerja, maupun dukungan regulasi, sementara pemerintah daerah memberikan pemaparan mengenai potensi unggulan sektor industri, pertanian, energi, pariwisata,

dan ekonomi kreatif. Diskusi berlangsung secara interaktif sehingga tercapai kesesuaian kebutuhan (matching demand and supply) yang diharapkan berujung pada komitmen kerja sama maupun realisasi investasi.

Kegiatan business matching ini diharapkan mampu mempercepat proses pengambilan keputusan investasi, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui terciptanya kemitraan yang saling menguntungkan antara pemerintah dan pelaku usaha di Provinsi Sumatera Selatan.

Tujuan : Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian Sumsel

Sasaran 2 : Peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang prima dan berbasis digitalisasi

Untuk mencapai sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Yang Prima dan Berbasis Digitalisasi dapat dilihat dari 2 (dua) indikator sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 dengan rincian pada tabel 3.10 di bawah ini :

Tabel 3.10
Pengukuran Kinerja Sasaran 2 Tahun 2025

Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2025		Persentase Tingkat Capaian
			Target	Realisasi	
1		2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Investor	Angka	89,97 (A)	91,81 (A)	102,05 %
2	Jumlah Peningkatan Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Digital Yang Diselesaikan Tepat Waktu Sesuai SOP	Angka	1500	2224	148,27 %
	Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Digital yang Diselesaikan Tepat Waktu Sesuai SOP	Persentase	10	38.05	380.5 %
Rata-rata Capaian					210,27 %

Sumber: Laporan Kinerja Triwulan IV Kelokpok kerja Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa 2 indikator sasaran yang telah ditetapkan menghasilkan capaian kinerja di atas 100% atau bermakna sangat baik.

Jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP mencapai 2224 izin dari target 1500 atau dengan kata lain persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP mencapai 38,05% dari target 10%. Apabila dibandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut ini :

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 2 dari Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi					Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90,27	89,89	88,82	89,97	91,81	100,74	100,26	99,01	99,74	102,04
2	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP	Angka	573	1.673	1.818	1.611	2.224	56,96	257,38	269,33	71,6	148,27
	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP	Persentase	0	0	0	0	38,05	0	0	0	0	148,27

Sumber : Laporan Kinerja Triwulan IV Tim kerja pp

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dari Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (2029)

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Jangka Menengah	Persentase Tingkat Capaian (%)
1		2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91,81 (A)	90,25 (A)	101,72
2	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP	Angka	2.224	1.900	117,05
	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP	Persentase	38,05	20	190.25 %

Sumber : Laporan Kinerja Triwulan IV 2025 Pokja PP

Tabel 3.12 Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah merupakan target akhir Renstra periode tahun 2029 terealisasi dengan nilai realisasi 91,81 dari target RPJMD Tahun 2029 90,25 dengan persentase capaian sebesar 101,72%. Berdasarkan Tabel 3.11. Realisasi dan capaian tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana tahun 2024 realisasi 89,97 (A) dan capaian 99,63%, pada tahun 2023 realisasi sebesar 88,82 (A) dan capaian 99,01%. Pada tahun 2022 realisasi sebesar 89,89 (A) dan capaian 100,26% dan pada tahun 2021 90,27(A) dan capaian 100,74%. Terlihat bahwa realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 sudah sangat baik. Realisasi kinerja tersebut menunjukkan bahwa unsur pelayanan persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produksi spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, sarana dan prasarana sudah baik karena rata-rata dari unsur Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 dengan nilai interval 4. Hal ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.13
Daftar Nilai Interval IKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00-2,5996	25-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	2,60-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Sumber data : Laporan Kinerja Triwulan IV 2025 Pokja PP

Pada tabel 3.13 diatas Nilai Interval Konversi IKM, maka nilai IKM Unit Pelayanan adalah 91.81 Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan adalah **“Sangat Baik”**.

Indikator jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) tahun 2025 sebanyak 2224 izin/ non izin dari target 1500 dengan persentase capaian target 148,27 % bila dibanding dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya mengalami peningkatan dimana tahun 2024 sebanyak 1611 dan capaian 71,16%, sementara target akhir Renstra (2025) adalah 1900 pelaku usaha, terlihat bahwa realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 sudah mencapai target. Persentase peningkatan persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP mencapai 38,05% dari target 10%. Data tersebut diambil dari aplikasi Online Single Submission Risk-Based Approach (Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko) dan melalui Aplikasi Si Cantik Cloud dan Manual).

Analisis pada sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan investasi yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 90,25 realisasi kerjanya mencapai 91,81 atau tercapai 101,72%, dan mengalami persentase peningkatan sebesar 2,03 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 89,97.

Pada Indikator Jumlah perizinan dan non izin yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP dengan target 2.500 izin non izin, hanya tercapai realisasi sebesar 2.224 izin non izin atau capaian kerjanya hanya mencapai 88,96 %. Hal ini di sebabkan karena dalam melaksanakan Program Pelayanan Penanaman Modal terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi sampai dengan saat ini, diantaranya adalah sbb:

1. Penyusunan Peraturan Daerah yang menyesuaikan dengan Peraturan Pusat memerlukan waktu dan koordinasi dengan berbagai

stakeholder, sedangkan anggaran belum memadai untuk melakukan kegiatan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait;

2. Permasalahan yang dialami didalam sistem OSS harus dikoordinasikan kepada Pemerintah Pusat dalam penyelesaiannya (tidak bisa secara langsung karena kendali sistem dikendalikan langsung oleh Pemerintah Pusat);
3. Kurangnya SDM Jabatan Fungsional Penata Perizinan dimana dengan adanya penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan pendelegasian sebanyak 174 Perizinan Berusaha dan Non Perizinan maka SDM perlu ditambah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan;
4. Perubahan pada struktur organisasi yang menyebabkan terhambatnya proses penerbitan dan pemrosesan perizinan sehingga mengurangi Tingkat capaian penerbitan izin pada periode Triwulan IV tahun 2025;
5. Perbedaan jangka waktu/SOP dengan tim teknis sehingga belum terintegrasi sepenuhnya;
6. Persyaratan PKKPR yang menjadi kewenangan Provinsi belum diakomodir sistem OSS;
7. Sering terjadinya gangguan sistem dalam pemrosesan Perizinan Terintegrasi Secara elektronik baik melalui OSS RBA maupun SICANTIK Cloud;
8. Belum tersosialisasinya penapisan Perizinan Lingkungan (AMDAL-NET) di sistem OSS bagi Pelaku Usaha;
9. Semenjak berlakunya PP 28 tahun 2025 pengganti PP 5 tahun 2021 yg diterapkan ke sistem OSS pada awal bulan November 2025, pelaku usaha harus menyelesaikan terlebih dahulu persyaratan dasar sebelum mengajukan Perizinan Berusaha, diantaranya :
 1. PKKPR
 2. Persetujuan Lingkungan
 3. PBG dan SLF

Setelah semua persyaratan dasar terpenuhi, investor/ pelaku usaha baru bisa mengajukan Perizinan Berusaha, hal tersebut mengakibatkan ada sebagian izin yang belum terselesaikan.

Analisis Penyebab keberhasilan/ peningkatan kinerja serta upaya yang akan dilakukan terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 seperti pada tabel 3.14 dibawah ini antara lain sbb :

Tabel 3.14
Realisasi Capaian Kinerja Utama Tahun 2025 sesuai PK Parubahan
Tahun 2025

Tujuan OPD : Meningkatnya Kontribusi Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan			Penjabaran Target					Realisasi				
NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4	2025	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
1	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PMTB)	%	30,50	7,50	15,25	23,00	30,50	30,02	7,32	14,98	22,65	30,02
2	Persentase Pertumbuhan Investasi	%	7.5	1,65	1,8	2,325	1,725	-11,63	-2,97	-3,06	77,23	-11,63

Sumber: Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Sekretariat

Pada tabel 3.14 diatas Persentase pembentukan modal tetap Bruto (%PMTB) merupakan indikator kinerja baru yang hasilnya diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Sepanjang tahun 2025, perkembangan PMTB menunjukkan pola progresif per triwulan. Pada Triwulan I, realisasi relatif moderat karena faktor siklus awal tahun anggaran dan tahap persiapan proyek. Memasuki Triwulan II dan III, terjadi percepatan realisasi investasi terutama pada sektor industri pengolahan dan konstruksi. Triwulan IV menjadi puncak realisasi tahunan dengan capaian kumulatif 30,02%. Meskipun terdapat deviasi tipis sebesar -0,48 poin dari target, kondisi ini bersifat teknis dan siklikal, terutama akibat pergeseran jadwal proyek multiyears dan dinamika harga komoditas global. Secara fundamental, tidak terjadi kontraksi investasi.

Struktur PMTB didominasi oleh investasi pada bangunan dan konstruksi, pengadaan mesin dan peralatan industri, serta alat berat sektor pertambangan dan perkebunan. Pertumbuhan ini mencerminkan

peningkatan kapasitas produksi daerah, perluasan infrastruktur, serta meningkatnya aktivitas hilirisasi berbasis sumber daya alam. Capaian PMTB Tahun 2025 memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas produksi, penyerapan tenaga kerja, serta penguatan daya saing ekonomi daerah. Ke depan, diperlukan percepatan hilirisasi industri, diversifikasi sektor manufaktur, serta penguatan monitoring realisasi investasi agar pertumbuhan PMTB lebih berkelanjutan.

Persentase Pertumbuhan investasi pada tahun 2025 realisasinya -11,63%. Secara keseluruhan, penurunan pertumbuhan investasi Sumatera Selatan tahun 2025 sebesar -11,63% lebih mencerminkan perlambatan yang bersifat struktural-administratif dan siklus proyek, bukan penurunan minat investasi secara fundamental. Kondisi ini menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan penguatan iklim investasi, peningkatan peran daerah dalam pengawasan, serta perbaikan mekanisme pencatatan realisasi investasi ke depan.

Walaupun dari sisi pertumbuhan investasi terjadi perlambatan tetapi dari sisi capaian target investasi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 di tahun 2025 sebesar Rp 42,5 T, telah tercapai dengan sangat baik dengan capaian Rp 62,67 T atau mencapai 147,46%. Dengan capaian tersebut, DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan akan terus melakukan berbagai upaya optimalisasi investasi pada masa mendatang guna mencapai target realisasi investasi yang ditetapkan.

Penyebab perlambatan investasi pada tahun 2025 disebabkan karena tidak tercapainya target realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA), hal tersebut dikarenakan Sumatera Selatan belum memiliki RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan kawasan industri yang bisa mendorong minat berinvestasi bagi investor baru terutama PMA. Sehingga sampai dengan saat ini Realisasi investasi masih didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi pada pelaporan ini berdasarkan capaian kinerja dan besaran sisa anggaran. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila target sasaran dapat dicapai, dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai atau melebihi target yang direncanakan. Dari 5 sasaran, terdapat 4 sasaran yang capaian kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi bisa dilihat pada tabel 3.15 sebagai berikut :

Tabel 3.15
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Rata-Rata %Capaian Kinerja	Rata-Rata %Capaian Keuangan	Tingkat Efisiensi	Keterangan
1	Meningkatkan Iklim Investasi yang Kondusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan	147,46	95,66	51,8	Efisien
2	Meningkatkan Investasi Melalui Kegiatan Promosi yang Efektif	46,4	97,06	-50,66	Tidak Efisiensi karena indikator baru dan baru direalisasikan pada TW 4
3	Meningkatkan Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	150	91,51	58,49	Efisien
4	Meningkatkan Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	233,33	94,05	138,95	Efisien
5	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Berbasis Resiko	148,27	98,74	49,53	Efisien

Sumber: Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2025

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan:

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerjanya itu ;

1. Sasaran mewujudkan iklim investasi yang kondusif berdaya saing

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 1 : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Berdaya Saing sebesar 79,66% . Pencapaian sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator. Program yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah program promosi penanaman modal, program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, program pengembangan iklim dan program pengelolaan data dan informasi penanaman modal

2. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang prima dan berbasis digitalisasi.

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Yang Prima dan Berbasis Digitalisasi sebesar 125,16%. Pencapaian sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indikator. Program yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah program pelayanan penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Tahun 2025, realisasi Belanja untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat sebesar Rp. 20.697.598.354,- (*Dua puluh milyar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah*) dari anggaran sebesar Rp. 22.230.058.158,- (*Dua puluh dua milyar dua ratus tiga puluh juta lima puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah*). Rincian Belanja Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumsel Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.16 di bawah ini :

Tabel 3.16
Rincian Belanja Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumsel Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% Capaian 2025
1	2	3	4=(3/2)*100
BELANJADAERAH	22.230.058.158	20.697.598.354	93,11
BELANJAOPERASI	22.230.058.158	20.697.598.354	93,11
BelanjaPegawai	14.712.582.738	14.092.919.768	95,79
BelanjaBarangdan Jasa	7.517.475.420	6.604.678.586	87,86
JUMLAHBELANJAOPERASI	22.230.058.158	20.697.598.354	93,11
BELANJAMODAL	0	0	0,00
BelanjaModalPeralatandanMesin	0	0	0,00
JUMLAHBELANJAMODAL	0	0	0,00
JUMLAHBELANJA	22.230.058.158	20.697.598.354	93,11
SURPLUS/DEFISIT	22.230.058.158	20.697.598.354	93,11

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

1) Realisasi Total Belanja

Realisasi Total Belanja DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 20.697.598.354,- atau 93,11% dan realisasi fisik 100%

2) Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.20.697.598.354,- atau 93,11% dan realisasi fisik 100 %

3) Realisasi Belanja Modal

I. Realisasi Belanja Modal DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 0,- atau 0% dan realisasi fisik 0% (terefisiensi).

II. Realisasi Keuangan

1. Rendah, Kegiatan dengan realisasi $0\% \leq 65\%$: 2 kegiatan
2. Sedang, Kegiatan dengan realiasi $66\% \leq 90\%$: 0 kegiatan
3. Tinggi, kegiatan dengan realisasi $91\% \leq 100\%$: 10 kegiatan

III. Realisasi Fisik

1. Rendah, Kegiatan dengan realiasi $0\% \leq 65\%$: 0 kegiatan
2. Sedang, Kegiatan dengan realiasi $66\% \leq 90\%$: 2 kegiatan
3. Tinggi, kegiatan dengan realisasi $91\% \leq 100\%$: 10 kegiatan

Realisasi Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2025, dapat dilihat pada Tabel 3.17 di bawah ini :

Tabel 3.17
Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD)	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase program penunjang urusan pemerintahan Daerah Povinsi Daerah Povinsi yang tercapai	%	100	100	18,689,928,000	17,296,027,068	92.54	100	APBD	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	100	116,472,000	68,491,911	58.81	83	APBD	
1	Sub Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2 (Renstra PD, dan Renja 2026)	2 (Renstra PD, dan Renja 2026)	38,460,000	18,218,652	47.37	100	APBD	
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2 (RKA-RKAP)	2 (RKA-RKAP)	26,548,500	26,132,515	98.43	100	APBD	
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2 (DPA-DPPA)	2 (DPA-DPPA)	26,548,500	3,350,000	12.62	30	APBD	proses revisi anggaran s/d TW 2, belanja jd tdk efektif

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD)	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP.	Laporan	4 (LKPJ, LPPD), LKJIP, SAKIP)	4 (LKPJ, LPPD), LKJIP, SAKIP)	24,915,000	20,790,744	83.45	100	APBD	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi keuangan yang terlaksana	%	100	100	15,409,456,000	14,438,847,910	93.70	100	APBD	
5	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	68	124	14,712,582,738	14,092,756,770	95.79	100	DAU dan APBD	
6	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12 (Adm)	12 (Adm)	644,793,262	298,828,000	46.34	100	APBD	
7	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12 (Verifikasi Dok)	12 (Verifikasi Dok)	34,080,000	30,580,000	89.73	100	APBD	
8	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 (Laporan Keuangan OPD)	1 (Laporan Keuangan OPD)	10,000,000	9,033,180	90.33	100	APBD	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD)	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	18 (Laporan smt OPD)	18 (Laporan smt OPD)	8,000,000	7,649,960	95.62	100	APBD	
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang tercapai	%	100	100	100,000,000	97,773,200	97.77	100	APBD	
10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Jumlah stel / paket pakaian Olahraga untuk aparat		-	-	-	-	-	0	APBD	Terefisiensi
11	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	22	22	100,000,000	97,773,200	97.77	100	APBD	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang tercapai	%	100	100	1,282,000,000	1,268,354,494	98.94	100	APBD	
12	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	40,000,000	39,821,270	99.55	100	APBD	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD)	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	-	-	-	-	0	APBD	Terefisiensi
14	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	260,000,000	248,377,432	95.53	100	APBD	
15	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	120,000,000	119,762,935	99.80	100	APBD	
16	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	2160 (surat kabar)	2160 (surat kabar)	12,000,000	11,985,000	99.88	100	APBD	
17	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan perjadi	90	90	850,000,000	848,407,857	99.81	100	APBD	
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang tercapai	%	100	100	-	-	-	0	APBD	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD)	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	-	-	-	0	APBD	Terefisiensi
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercapai	%	100	100	954,000,000	908,974,475	95.28	100	APBD	
19	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12,000,000	11,950,000	99.58	100	APBD	
20	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	48	500,000,000	464,224,475	92.84	100	APBD	
21	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	442,000,000	432,800,000	97.92	100	APBD	
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dan siap operasional	%	100	100	28,000,000	513,585,078	62.03	70	APBD	
22	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	15	500,000,000	367,027,178	73.41	100	APBD	Palembang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD)	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peratan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	139,000,000	136,557,900	98.24	100	APBD	
24	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	1	1	189,000,000	10,000,000	5.29	10	APBD	Pemeliharaan dibatalkan karena rencana pindah kantor
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tercapainya Persentase Pertumbuhan Investasi Penanaman Modal	%	7,5	-11,63	979,625,000	937,104,246	95.66	100	APBD	
8	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Tingkat Capaian Penetapan Fasilitas / Insentif Penanaman Modal daerah	%	100	100	100,000,000	98,897,841	98.90	100	APBD	
25	Sub Kegiatan Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara usaha besar (PMA-PMDN) dengan UMKM daerah	dokumen MoU kesepakatan	5	17 (MoU)	100,000,000	98,897,841	98.90	100	APBD	
9	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Tingkat Capaian Pembuatan Peta Potensi investasi Provinsi	%	100	100	879,625,000	838,206,405	95.29	100	APBD	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD)	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
26	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Dokumen RUPM Tahun 2025-2045	1	1	294,144,000	271,007,196	92.13	100	APBD	
27	Sub Kegiatan Pemuktahiran Data Potensi Daerah Pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemuktahiran data potensi investasi	Daerah	17 (Kab/kota)	17 (Kab/kota)	100,000,000	88,973,523	88.97	100	APBD	
28	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	jumlah dokumen peta potensi investasi provinsi	Dokumen kajian PPID	2 (ikan patin dan sapi)	2 (ikan patin dan sapi)	485,481,000	478,225,686	98.51	100	APBD	
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Terlaksananya Penyusunan Strategi dan Pelaksanaan promosi penanaman modal kewenangan Daerah Provinsi	%	100	100	600,000,000	582,355,026	97.06	100	APBD	
10	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Tercapainya Promosi penanaman modal kewenangan daerah provinsi	%	100	100	600,000,000	582,355,026	97.06	100	APBD	
29	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Provinsi	Dokumen	1 (Penyusunan Strategi Promosi)	1 (Penyusunan Strategi Promosi)	250,000,000	238,764,974	95.51	100	APBD	Kolaborasi dan kerjasama Tim Promosi PM dgn pihak lainnya yang terkait

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD)	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
30	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Dokumen	1 Pelaksanaan Promosi -4 event)	1 (Pelaksanaan Promosi -4 event)	350,000,000	343,590,052	98.17	100	APBD	Kolaborasi dan kerjasama Tim Promosi PM dgn pihak lainnya yang terkait
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tercapainya Kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, terintegrasi dan transparan	izin/non izin	1500	2,224	1,186,770,580	1,171,848,802	98.74	100	APBD	
11	Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang cepat, terintegrasi dan transparan	%	100	100	1,186,770,580	1,171,848,802	98.74	100	APBD	
31	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Pelaku Usah	1500	2224	1,186,770,580	1,171,848,802	98.74	100	APBD	Peran serta dan kolaborasi antar tim kerja dan Kabkota

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD)	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tercapainya nilai realisasi Invesasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri	T Rp	42.50	62,67	691,985,000	633,214,807	91.51	100	APBD	
12	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase tingkat kepatuhan investor / pelaku usaha	%	100	100	691,985,000	633,214,807	91.51	100	APBD	
32	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	jumlahnya kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dan pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Kegiatan Usaha	32	46	383,255,000	354,942,416	92.61	100	APBD	perlunya optimalisasi pengawasan terintegrasi antar OPD teknis
33	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kegiatan Usaha	6	9	110,000,000	97,623,041	88.75	100	APBD	Perlunya kolaborasi antar OPD teknis

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD)	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
34	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan berusaha ber4basis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko	Pelaku Usaha	300	300	198,730,000	180,649,350	90.90	100	APBD	Perlu inovasi pembinaan melalui media digital
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tercapainya Rasio Tingkat layanan terhadap ketersediaan data dan sistem informasi Penanaman Modal	angka	2	0,75	81,749,578	76,885,407	94.05	100	APBD	
13	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Pengelolaan Data dan informasi Perizinan dan non perizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	%	100	100	81,749,578	76,885,407	94.05	100	APBD	
35	Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	3 (Buku database Sektoral)	7 (Buku database Sektoral)	81,749,578	76,885,407	94.05	100	APBD	Belum optimalnya upaya pengelolaan data dan informasi PP dan PM
	Jumlah : 35 Sub Kegiatan					22,230,058,158	20,697,598,354	93.11	100		

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan DPMPSTP Triwulan IV Tahun 2025

Penghargaan DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Di tahun 2025 ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan mendapat juara 3 Nasional Penilaian Kinerja PTSP dan PBB hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut kinerja tahun 2024. Untuk wilayah Sumatera, DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan mendapat juara 1. Prestasi Lainnya adalah menjadi juara 1 stand terbaik pada pameran 13th Bandung Indonesia Tourism Trade Investment Expo yang dilaksanakan pada 24-27 Juli 2025 di Cihampelas Walk Bandung, Jawa Barat. Selain itu, DPMPTSP Prov. Sumsel juga menjadi juara stand terbaik di bidang informasi pada ajang yang sama di kota Batam yang diselenggarakan pada 13-16 November 2025 di Nagoya Hills Shopping Mall Batam.



Gambar 3. 11
Sertifikat Juara 3 Nasional penilaian kinerja PTSP
PBB hasil monitoring dan evaluasi



Gambar 3.12
Sertifikat Juara 1 Stan Terbaik dalam acara Pameran 13 Tahun 2025
Bandung Indonesia Tourism Trade Investment Expo



Gambar 3.13
Juara Stand terbaik di bidang informasi pada ajang yang sama di
Kota Batam

Tindak lanjut Evaluasi Tahun 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan telah menindaklanjuti hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada Tabel 3.18 sebagai berikut di bawah ini :

Tabel 3.18
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP Provinsi Sumsel Tahun 2024

No.	Rekomendasi	Komponen pada SAKIP	Rencana aksi/langkah Kerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Dukung (Upload)	Anggaran (Rp)	WAKTU				WAKTU PELAKSANAAN	KONDISI SETELAH TINDAK LANJUT	OUTPUT / HASIL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		
							TW I	TW II	TW III	TW IV					SELESAI	DALAM PROSES	BELUM
1	Melakukan perencanaan anggaran yang mendukung kinerja dapat dilihat pada Dokumen Renja DPMPTSP Tahun 2024	Perencanaan	Kami Telah menyusun Renja Tahun 2024	- Program : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	https://drive.google.com/drive/folders/1Cf69shVHtRNuHmHCxWlqLTPINr6k4GYb?usp=drive_link	15,000,000					Tahun 2024	Penyelarsan Data Dukung	Sesuai dengan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	Sekretaris DPMPTSP dan Ketua Pokja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	v		
2	Melakukan perbaikan kualitas implementasi SAKIP sebagai wujud telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Pengukuran	melakukan rapat internal Pimpinan dan staf	- Program : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	https://drive.google.com/drive/folders/1Fp8PpTpzVXvOCefagxfmrIU8XUIKE3e?usp=drive_link	15,000,000	v				Februari 2025			Kepala Dinas DPMPTSP, Sekretaris, Tim Sakip, Tim Penilai SAKIP DPMPTSP	v		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

No.	Rekomendasi	Komponen pada SAKIP	Rencana aksi/ langkah Kerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Dukung (Upload)	Anggaran (Rp)	WAKTU				WAKTU PELAKSANAAN	KONDISI SETELAH TINDAK LANJUT	OUTPUT / HASIL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		
							TW I	TW II	TW III	TW IV					SELESAI	DALAM PROSES	BELUM
3	Manfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai sarana perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan mendukung efektivitas dan efisiensi kerja	Pengukuran	melakukan rapat internal Pimpinan dan staf	- Program : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	https://drive.google.com/drive/folders/1GK6JdbyPHT-APOONtYmUbSRk8Zi5NZ2s?usp=drive_link	15,000,000	v				Februari 2025			Kepala Dinas DPMPPTSP, Sekretaris, Tim Sakip, Tim Penilai SAKIP DPMPPTSP	v		
4	Melakukan perbaikan kualitas implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja internal dilingkungan unit kerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	melakukan rapat internal Pimpinan dan staf	- Program : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	https://drive.google.com/drive/folders/1zs-8_HGhB3IGDyqD2pUzqycUQicapLeR?usp=drive_link	15,000,000	v				Februari 2025			Kepala Dinas DPMPPTSP, Sekretaris, Tim Sakip, Tim Penilai SAKIP DPMPPTSP			

5	meningkatkan an evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan tidak hanya sebatas pembahasaan/analisis terhadap dokumen tasi tetapi juga menggunak an teknik lainnya	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		- Program : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Reaslisasi SKPD	https://drive.google.com/drive/folders/1hD4Y4YaUm2d3br_21uaYMLzF-kxGWHyl?usp=drive_link	15,000,000										Kepala Dinas DPMPPTSP, Sekretaris, Tim Sakip, Tim Penilai SAKIP DPMPPTSP			
6	Agar melaksanakan an hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai sarana perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan mendukung efektivitas dan efisiensi kerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Telah melakukan implementasi sakip dimanfaatkan untuk mendukung efektivitas dan efiseinsi kinerja dalm mencapai target iku indikator realisasi investasi baik PMA maupun PMDN		https://drive.google.com/drive/folders/1YYnABQkeNwIRXViZ11WhUk0ZH3NUiOI?usp=drive_link		v									Kepala Dinas DPMPPTSP, Sekretaris, Tim Sakip, Tim Penilai SAKIP DPMPPTSP			

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

7	Agar hasil dari tindak lanjut dari rekomendasi dalam LHE AKIP ITDA 2023 pada DPMPTSP dapat dilihat dari perbaikan kinerja penyusunan PK tahun 2024	Evakuasi Akuntabilitas Kinerja Internal	kami Telah menyusun Perjanjian Kinerja sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2024	- Program : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	https://drive.google.com/drive/folders/1Ov_12AZ8PSnxf9e-allYyh4gPFa4gB3?usp=drive_link	15,000,000	v				Januari 2025	Telah menyusun PK Pejabat Struktural, JFU	Melaksanakan Tusi sesuai dengan dengan PK	Seluruh ASN DPMPTSP Sumsel	v		
8	Hasil dari evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja dapat dilihat pada dokumen LKjIP halaman 53 dan 54 tentang penghargaan kinerja DPMPTSP peringkat 4 nasional	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Telah melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha, yang mana telah mendapatkan peringkat 3 Nasional dalam Penghargaan Anugerah Layanan Investasi (ALI) dari Presiden Republik Indonesia	- Program : Pelayanan Penanaman Modal - Kegiatan: Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	https://drive.google.com/drive/folders/1vxql6ch-5qH-f9qqTPRfHZOPKsnlmPbq?usp=drive_link	225,000,000	v				Tahun 2024	mendapatkan Peringkat III nasional atas Anugerah layanan Investasi Tahun 2024 dari Kementerian Intasi	Penghargaan	Kepala DPMPTSP , Sekretaris DPMPTSP, Tim Sakip dan Tim Penilai Mandiri Sakip	v		

Tabel 3.19
Rekomendasi, Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2025 dan Rencana Aksi Tahun 2026

Rekomendasi	Rencana Aksi	Langkah Kerja	Output/ Hasil
Tujuan dan Sasaran dalam dokumen perencanaan jangka pendek agar lebih menggambarkan kondisi kinerja yang ingin dicapai secara jelas dan terukur	DPMPTSP Provinsi Sumsel telah merumuskan tujuan dan sasaran kinerja yang jelas dan terukur, dan menyelaraskan antara dokumen perencanaan jangka pendek (Renja 2026) dengan dokumen jangka menengah (Renstra DPMPTSP 2025 - 2029).	1 Mereview atau mengevaluasi dokumen Renja 2026 dan menyelaraskan dengan Dokumen Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029	Renstra DPMPTSP Tahun 2025 - 2029 Dokumen evaluasi / review Renja 2026-Renstra 2025-2029
		2 Mereview atau mengevaluasi serta menganalisa penyelarasan Rencana Kerja Tahun 2025, 2026 dan Tahun 2027 dengan dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra 2025-2029) Dokumen Renja Tahun 2026 dengan Dokumen Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029	Dok review evaluasi Renja Tahun 2025-2027 dengan Renstra 2025-2029
		3 Melengkapi dokumen perencanaan RKA 2026 dengan KAK/TOR dan rencana anggarakan kas	Contoh sample Dokumen RKA, KAK dan angkas Tahun 2026
		4 Menetapkan tujuan dan indikator pencapaian tujuan OPD dalam dokumen Renstra OPD sebagai IKU OPD yang akan dicapai secara bertahap (renja tahunan) selama lima tahun perencanaan strategis OPD	Cascading, IKU Kadis/ PK Kadis 2026, IKU, IKK 5 Tahun
		5 Melakukan evaluasi RKA/DPA Tahun 2026 agar sesuai penetapan Renja 2026 dengan indikator sesuai Kepmendagri 800.1.-2850 dan Renstra DPMPTSP 2025-2029, dan akan diselaraskan dan disempurnakan pada usulan APBD perubahan tahun 2026	Evaluasi tabel indikator kinerja Renja 2026 dengan Renstra OPD dan Rencana perbaikan indikatot di APBD Perubahan 2026
Setiap pegawai hendaknya memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Seluruh pegawai Dpmptsp Provinsi Sumsel telah berkomitmen dalam pencapaian kinerjanya masing-masing melalui Perjanjian Kinerja (PK Tahun 2026), dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya	1 Setiap ASN DPMPTSP Provinsi Sumsel telah melakukan dialog kinerja dengan pejabat penilaiannya (atasan langsung) masing-masing yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja PK Tahun 2026	Laporan penyusunan PK Dpmptsp dan dokumentasi
			Tagging Perjanjian Kinerja 2026
			PK ASN Dpmptsp Tahun 2026

	bersinergi mewujudkan tujuan sasaran strategis DPMTSP	2 Melakukan pelaporan kinerja per hari pada E-kinerja BKN dan menyampaikan laporan kinerja per bulan kepada pimpinan (pejabat penilai) sebagai bentuk evaluasi kinerja terhadap target kinerja yang dicapai.	Dokumen Ekinerja pegawai Photo screenshot laporan kinerja harian BKN dan photo screenshot laporan kinerja bulanan
			Rekap laporan kinerja ASN Dpmtsp perbulan
		3 DPMTSP melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja setiap pegawai dengan memberikan apresiasi dan sanksi.	Rekap Ekin seluruh pegawai
			Laporan kinerja pegawai Dpmtsp Triwulan I Tahun 2026
Menggunakan data kinerja yang relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan	DPMTSP telah melakukan pemetaan sasaran dan indikator kinerja dan menganalisis data kinerja yang bersesuaian untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan	1 Melakukan analisis dan evaluasi sasaran strategis dan indikator pengukuran capaian kinerja dalam dokumen perencanaan Renstra DPMTSP tahun 2025-2029 pada penyusunan pelaporan kinerja	Dokumen analisis capaian indikator kinerja OPD
		2 Menetapkan standar pengukuran capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja yang terukur beserta data dukung yang dibutuhkan	Dokumen Standar pengukuran indikator kinerja strategis
		3 Melakukan evaluasi secara berkala capaian kinerja sasaran strategis dan indikatornya dengan data dukung yang relevan	Laporan kinerja per triwulan pertim kerja dan OPD

Setiap unit/satuan kerja hendaknya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerjanya	DPMPTSP telah berupaya meningkatkan pemahaman dan kepedulian setiap unit/satuan kerja (Tim kerja) terhadap hasil pengukuran kinerjanya masing-masing maupun kinerja perangkat daerah melalui pembinaan internal OPD	1	Mengajak seluruh unit/satuan kerja (Tim Kerja) dalam penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	SK Tim Tim kerja DPMPTSP Tahun 2026, SK Tim kerja Renstra, Renja 2026
				Notulen Rapat pembahasan Renstra
		2	Melaksanakan pembinaan bimbingan teknis kepada seluruh tim kerja tentang implementasi tujuan, sasaran strategis (Pohon Kinerja - Cascading) OPD terhadap pencapaian kinerja dan indikatornya dengan nara sumber dari Bappeda Prov. Sumsel	Notulen pembinaan bimtek, sosialisasi penyusunan PK 2026 dari Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
		3	Melaksanakan rapat koordinasi/diskusi internal DPMPTSP dalam penyusunan tujuan, sasaran strategis (Pohon Kinerja - Cascading) OPD dengan melibatkan seluruh unit/tim kerja	Notulen rapat pembahasan penyusunan pohon kinerja-Cascading dengan tim kerja masing-masing
		4	Mengintruksikan (Memo Dinas) setiap Tim Kerja melaporkan hasil pencapaian kinerjanya setiap triwulan kepada Kepala DPMPTSP sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang telah disepakati.	Instruksi (Memo Dinas) Pelaporan kinerja Laporan kinerja triwulan dari tim kerja dengan nota dinas
Agar seluruh pegawai peduli terhadap penyajian informasi dalam laporan kinerja	DPMPTSP telah berupaya meningkatkan kepedulian pegawai terhadap kualitas informasi yang disajikan dalam laporan kinerja melalui pembinaan internal SDM secara berkala maupun pendampingan langsung/personal.	1	DPMPTSP telah menyusun Standar operasional prosedur (SOP) pelaporan kinerja pegawai sesuai ketentuan yang berlaku	Standar operasional prosedur (SOP) pelaporan kinerja pegawai Surat edaran kadis tentang pelaporan kinerja
		2	DPMPTSP telah melaksanakan pembinaan internal pegawai ASN tentang pelaporan dan penyajian data kinerja yang berkualitas	Arahan Kepala Dinas
		3	Melaksanakan verifikasi dan evaluasi terhadap penyajian data dan informasi dalam laporan kinerja yang disusun berdasarkan Standar yang telah ditetapkan	Dokumentasi pemeriksaan laporan kinerja pegawai

Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas internal yang dilakukan oleh APIP dalam peningkatan implementasi SAKIP	DPMPTSP telah menindaklanjuti rekomendasi APIP melalui implementasi SAKIP OPD	1.	Identifikasi rekomendasi hasil evaluasi APIP	Laporan hasil identifikasi
		2	Menyusun rencana Tindak lanjut (RTL)	Dokumen RTL
		3	Pelaksanaan RTL	Laporan pelaksanaan RTL
		4	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RTL	Laporan Monitoring evaluasi (Monev) pertriwulan (laporan Konsolidasi dan capaian realisasi triwulan IV Tahun 2025)
		5	Perbaikan hasil Monev RTL	Dokumen Rencana perbaikan hasil monev RTL
		6	Penyelenggaraan SAKIP	Laporan Monitoring evaluasi (Monev) pertriwulan (laporan Konsolidasi dan capaian realisasi triwulan IV Tahun 2025)
		7	Dpmptsp telah menyusun LKJIP Tahun 2025 sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan APIP sesuai PermenPNRB Nomor 53 Tahun 2014 peraturan tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	Dokumen Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025
Memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh APIP dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja	Dpmptsp telah melakukan perbaikan implementasi SAKIP untuk pencapaian kinerja yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis OPD dengan memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh APIP.	1	Menganalisis LHE akuntabilitas kinerja dari APIP dan menyusun RTL	Perbaikan dokumen perencanaan , Dokumen RTL
		2	Integrasi RTL dalam dokumen rencana operasional SAKIP	Dokumen pemetaan RTL dengan SAKIP
		3	Implementasi SAKIP untuk perbaikan kinerja yang lebih efektif dan efisien	Laporan progres SAKIP OPD
		4	Penguatan sistem pengendalian internal OPD	Dokumen penguatan dan implementasi SAKIP OPD
		5	Pelaporan capaian kinerja perangkat daerah secara berkala (triwulan) berdasarkan laporan capaian kinerja pertriwulan setiap unit/tim kerja.	Laporan Kinerja Pertriwulan Pokja-pokja (Laporan Triwulan IV Tahun 2025) dan Draft Laporan Triwulan Pokja-pokja Tahun 2026 sesuai Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Selatan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta fasilitasi penanaman modal selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan tahun 2025.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Capaian kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah tercapai dengan baik, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan perizinan, percepatan proses pelayanan, serta peningkatan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memberikan pelayanan yang cepat, mudah transparan dan akuntabel kepada masyarakat dan pelaku usaha. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain adanya perubahan kebijakan berlakunya PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, keterbatasan SDM yang berkualitas dan berpengalaman di tim kerjanya masing-masing, serta perubahan indikator kinerja terkait telah disusunnya Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029, serta faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi pencapaian target kinerja secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan koordinasi antar perangkat daerah K/L Meso, koordinasi perangkat daerah dengan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi DPMPTSP. Seperti Kementerian KEMINVESTASI untuk tim kerja teknis penata kelola penanaman modal dan dengan Kementerian dalam negeri untuk tim kerja penata pelayanan publik.

Melalui penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan serta menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal dapat terus ditingkatkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di wilayah Sumatera Selatan.

Selanjutnya disadari juga bahwa pembuatan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dalam menganalisis.

Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya demi meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 11 Maret 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,



H. Lusapta Yudha Kurnia, S.E., M.M
Pembina Utama/Muda/IV.c
NIP. 197909012006041008

LAMPIRAN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Lusapta Yudha Kurnia, S.E., M.M
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. Herman Deru
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 29 Oktober 2025

Pihak Kedua
Gubernur Sumatera Selatan,

H. Herman Deru

Pihak Pertama
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan,

H. Lusapta Yudha Kurnia, S.E., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909012006041008

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kontribusi Investasi Terhadap Perekonomian Sumatera Selatan	1. Persentase Pembentukan Modal Bruto	%	30,50
		2. Persentase Pertumbuhan Investasi	%	7,5

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah	Rp. 18.689.928.000	APBD
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 979.625.000	APBD
3. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 600.000.000	APBD
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 1.186.770.580	APBD
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 691.985.000	APBD
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 81.749.578	APBD

Palembang, 29 Oktober 2025

Gubernur Sumatera Selatan,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan,

H. Herman Deru

H. Lusapra Wulha Kurnia, S.E., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909012006041008



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 No. 90 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon dan Faksimile : (0711) 411007 - (0711) 411199 Kode Pos 30128

Website : www.bp3md.sumselprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. LUSAPTA YUDHA KURNIA, S.E., M.M
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ELEN SETIADI, S.E., M.S.E
Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ELEN SETIADI, S.E., M.S.E

Palembang, 31 Januari 2025

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H. LUSAPTA YUDHA KURNIA, S.E., M.M
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 197909012006041008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	SASARAN STRATEGIS	INDKATOR KINERJA	TARGET
1.	Mendorong Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif	1. Nilai Realisasi Investasi PMA (Triliun Rp.) 2. Nilai Realisasi Investasi PMDN (Triliun Rp.) 3. Jumlah Investor / Proyek (Perusahaan / unit usaha) 4. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi (%)	20,00 T 22.50 T 1200 8%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan investasi yang Efektif dan Efisien	1. Indeks Kepuasan Investor (angka) 2. Jumlah Perizinan dan Non perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP (angka)	90,25 2500

Program / Kegiatan	Anggaran	
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 19.196.704.000	APBD
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 3.022.944.000	APBD
3. Program Promosi Penanaman Modal	Rp 1.400.000.000	APBD
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 1.450.000.000	APBD
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 2.088.078.578	APBD
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 200.000.000	APBD
TOTAL	Rp 27.357.726.578	

PJ. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



ELEN SETIADI, S.E., M.S.E

Palembang, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. LUSAPTA YUDHA KURNIA, S.E., M.M
 Pembina Utama Muda / IV.c
 NIP.197909012006041008